TABLOID SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 27 Agustus - 2 September 2025
No. 4100
Tahun LV



8 55 TAHUN SINAR TANI

12 Lahan Kering dan Rawa, Asa Baru Kedaulatan Pangan

14 Makan Ubi, Bikin Buang Angin?



ADA APA DENGAN BERAS ?

www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

Beras, Komoditas Seksi

Masalah perberasan dalam negeri terus bergulir. Sebagai bahan pangan pokok yang strategis, gejolak komoditas beras memang menjadi isu yang sangat sensitif. Jika melihat pemberitaan di media massa, maka perbincangan mengenai perberasan terus bergulir sejak awal tahun 2025. Meski pada tahun lalu, juga ramai. Kini hingga pertengahan tahun, polemik perberasan belum juga selesai.

Catatan Tabloid Sinar Tani merunut mulai ramainya polemik perberasan, saat Kepala Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah Dan Beras yang terbit 12 Januari 2025 dan berlaku mulai 15 Januari 2025. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan beras yang baru.

Namun hanya berlaku dua minggu, Kepala Badan Pangan Nasional kemudian menerbitkan Surat Keputusan yang baru No. 24 tahun 2025. Dalam SK tersebut, pemerintah hanya menetapkan satu harga yakni HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg.

Artinya, pemerintah tidak lagi menetapkan HPP GKP di penggilingan padi dan Gabah Kering Giling (GKG) baik di penggilingan maupun di gudang Bulog. Begitu juga harga beras di gudang Perum Bulog. Dalam keputusan tersebut, pemerintah juga tidak menetapkan standar kualitas seperti kadar air (KA) maksimal 26 persen maupun kadar hampa (KH) maksimal 10 persen. Dalam keputusan tersebut, Perum Bulog juga 'wajib' membeli gabah dengan kualitas apapun (any quality) di tingkat petani.

Sementara itu, melalui berbagai program Kementerian Pertanian pun mengungkap kenaikan produksi beras pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional periode Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.

Bahkan dengan pembelian gabah any quality, pengadaan beras Bulog hingga pertengahan tahun 2025 bisa menembus angka 2,6 juta. Dengan tambahan carry over beras tahun 2024, stok beras di gudang Bulog menembus 4,2 juta ton. Angka ini menurut Mentan Andi Amran Sulaiman tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Namun di tengah melimpahnya produksi dan stok beras di dalam negeri, justru pasar beras bergejolak. Harga beras merambat naik. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan berbagai kalangan. Untuk menahan harga makin naik, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kemudian meminta Bulog menggelontorkan beras pemerintah, baik dalam bentuk bantuan pangan dan beras SPHP.

Di tengah gejolak harga beras saat produksi berlimpah tersebut kemudian mencuat kasus oplosan beras saat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan melontarkan pernyataan kasus 212 merek beras ditemukan tidak sesuai dengan standar mutu dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Bahkan kasus oplosan beras menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo mengungkap adanya praktik manipulasi di pasar beras nasional. Terdapat beras kualitas eceran atau medium dikemas sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga jauh di atas HET.

Kasus oplosan tersebut kemudian menjerat beberapa pelaku usaha. Imbasnya, beras premium sempat menghilang di mini market, meski kini ketersediaannya kembali ada. Dalam diskusi di Paradoks Perberasan yang diselenggarakan Ombudsman RI, Selasa (26/8), berbagai kalangan justru mempertanyakan kepada pemerintah. Mengapa polemik perberasan ini berlarut-larut?

M E N M E N Y A P A



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Benahi Ekosistem Perberasan

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembenahan ekosistem perberasan nasional dilakukan bukan hanya untuk menjaga stabilitas pangan, tetapi juga demi memastikan kesejahteraan petani terus meningkat.

Selama bertahun-tahun ekosistem perberasan tidak sehat karena adanya praktik curang seperti beras oplosan dan permainan harga oleh segelintir pelaku usaha besar. Akibatnya, petani dan masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Sekarang negara hadir. Petani harus sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum. Inilah yang kita benahi. Mafia pangan tidak boleh lagi menguasai rantai perberasan kita.

Hasil dari berbagai langkah pembenahan sudah mulai terlihat. Serapan gabah oleh Bulog melonjak dari 3.000 ton per hari menjadi 6.000 ton per hari. Cadangan beras pemerintah juga mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun, yakni 4,2 juta ton, jauh melampaui stok tahun lalu yang hanya sekitar 1 juta ton.

Kebijakan penyerapan gabah yang lebih agresif dari Bulog membuat harga gabah petani terjaga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di kisaran Rp6.500 per kg. Dampaknya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2025 tercatat 122,64, menandakan peningkatan nyata kesejahteraan petani.

Selain itu, pemerintah juga mengamankan cadangan beras dan mempercepat distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini berhasil menurunkan harga beras di 15 provinsi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan Sumatera Utara.

Ini bukti bahwa pembenahan ekosistem perberasan tidak hanya menyelamatkan konsumen, tetapi juga meningkatkan semangat petani sekaligus menggairahkan industri penggilingan kecil dan pasar tradisional yang sebelumnya terhimpit dominasi segelintir pelaku besar.

Dengan stok beras pemerintah yang kuat, harga yang mulai stabil, serta meningkatnya kesejahteraan petani, kami optimistis Indonesia mampu menghadapi gejolak global sekaligus menuju kedaulatan pangan. Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kesejahteraan mereka akan terus menjadi prioritas utama pemerintah.

Kebijakan di sektor perberasan saat ini dirancang untuk menjaga keseimbangan: petani memperoleh harga gabah yang layak, sementara masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau.

Pemerintah pun tengah melakukan langkah konkret dengan melepas stok beras cadangan pemerintah sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Pelepasan stok ini dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digencarkan Perum Bulog bersama TNI/Polri dan instansi terkait.

Kami mengingatkan bahwa mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis perberasan. Investigasi yang dipimpinnya menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar, dan kasus ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menjaga harga gabah petani di level Rp6.500 per kg, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Serapan gabah oleh Bulog meningkat dua kali lipat menjadi 6.000 ton per hari. Data terbaru, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 122,64 pada Juli 2025, menandakan peningkatan nyata kesejahteraan petani.







Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Petani Wajib Tahu!
Inilah Daftar Gulma Perkebunan Sawit

Petani sawit harus waspada! Gulma diam-diam jadi “silent killer” di kebun, bisa memangkas panen hingga 50% jika dibiarkan. Kenali jenis-jenisnya sebelum hasil panen ambruk!



Di balik kebun sawit yang hijau dan rapi, ada musuh diam-diam yang sering disepelekan yaitu gulma. Jangan salah, kalau dibiarkan, gulma bisa memangkas hasil panen sampai setengahnya!

Bukan cuma berebut makanan (unsur hara dan air), gulma juga bisa menutupi cahaya matahari, merusak akar, bahkan bikin sawit lebih rentan kena penyakit.

Gulma Paling Ganas

Di antara sekian banyak jenis gulma, ada beberapa yang terkenal bandel dan sulit dikendalikan. Misalnya, sembung rambat atau Mikania micrantha. Gulma ini tumbuh dengan kecepatan luar biasa.

Dalam waktu singkat, ia sudah merambat menutupi piringan sawit sehingga proses fotosintesis terganggu. Kalau sawit kesulitan bernafas, panen pasti berkurang.

Lalu ada gulma siam (Chromolaena odorata) yang dikenal mudah sekali tumbuh kembali meskipun sudah ditebas. Ia bisa menguasai satu hamparan kebun hanya dalam hitungan bulan. Petani yang pernah berhadapan dengan gulma siam pasti tahu betapa susahnya menahan lajunya.

Alang-alang atau Imperata cylindrica juga tak kalah berbahaya. Dengan akar serabut yang dalam dan kuat, ia menyedot unsur hara serta air yang seharusnya untuk sawit. Akibatnya, tanaman melemah, buah berkurang, dan produktivitas kebun menurun drastis.

Ada juga rumput kipahit (Paspalum conjugatum). Dari luar tampak biasa, tetapi saingannya sangat ketat dengan sawit dalam hal nutrisi. Kehadirannya bisa membuat tandan buah segar sawit berkurang. Sementara itu, rumput tegar (Cynodon dactylon) memang tidak langsung menurunkan hasil panen, tetapi diam-diam ia membuat pupuk yang diberikan tidak terserap maksimal. Artinya, biaya pupuk membengkak, hasil panen tak sebanding.

Lebih licik lagi adalah rumput teki (Cyperus rotundus). Ia terkenal sulit diberantas. Akar umbinya dalam tanah bisa bertahan lama, bahkan setelah gulmanya ditebas. Teki juga menghasilkan zat alelopati, semacam racun alami yang membuat bibit sawit sulit tumbuh sehat.

Selain teki, ada pula babawangan (Fimbristylis miliacea) yang mirip, namun dampaknya pada bibit tak kalah parah. Tanaman muda sawit akan sulit berkembang bila berhadapan dengan gulma ini. Rumput pita (Axonopus compressus) lain lagi ceritanya. Ia menutup tanah rapat-rapat, membuat kelembaban tinggi, dan kondisi itu sangat disukai penyakit akar maupun jamur.

Rumput uler (Panicum repens) punya akar menjalar kuat, membuatnya sulit diberantas. Ia juga rakus menyerap nutrisi sehingga sawit makin kekurangan makanan. Terakhir, bandotan (Ageratum conyzoides), gulma yang seolah tak ada habisnya. Cepat berbunga, menghasilkan banyak biji, dan gampang menyebar ke seluruh kebun hanya dengan bantuan angin atau air hujan.

Cara Jitu

Menghadapi gulma-gulma ganas ini, petani sawit tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Dibutuhkan pendekatan pengendalian gulma terpadu. Langkah pertama tentu saja dengan menjaga sanitasi lahan. Artinya, kebun harus rutin dibersihkan. Jangan tunggu gulma tumbuh lebat baru ditebas, karena semakin lama dibiarkan, semakin sulit pula dikendalikan.

Pemangkasan berkala juga penting, terutama untuk gulma yang merambat atau menutupi piringan sawit. Pemangkasan akan membuka akses cahaya matahari sehingga sawit tetap bisa berfotosintesis dengan baik.

Jika kondisi gulma sudah parah, penggunaan herbisida selektif bisa dipertimbangkan. Herbisida harus dipilih sesuai jenis gulma, dengan dosis tepat agar efektif tanpa merusak tanaman utama.

Selain pengendalian langsung, petani juga bisa memperkuat tanahnya. Tanah yang sehat membuat sawit lebih kuat melawan persaingan gulma.

Caranya dengan menambahkan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa pelepah sawit yang dikomposkan. Bahan organik memperbaiki struktur tanah sekaligus meningkatkan ketersediaan nutrisi.

Strategi lain yang terbukti ampuh adalah menggunakan tanaman penutup tanah atau cover crop. Biasanya dipakai kacangan penutup tanah yang bisa menekan pertumbuhan gulma sekaligus menambah nitrogen alami.

Dengan cara ini, gulma kalah bersaing sejak awal. Beberapa petani juga mulai memanfaatkan mulsa biologis dan tanaman pendamping tertentu sebagai musuh alami gulma.

Petani sawit sebaiknya tidak menunggu gulma menjadi masalah besar. Begitu ada tanda-tanda awal pertumbuhan gulma berbahaya, segera lakukan tindakan. Dengan pengendalian sejak dini, biaya bisa lebih hemat dan hasil panen tetap terjaga.

Pada akhirnya, keberhasilan petani sawit tidak hanya ditentukan oleh pupuk atau harga pasar. Pengelolaan gulma yang baik justru menjadi fondasi utama menjaga produktivitas. Jadi, jangan biarkan gulma mengambil alih kebun.

Dengan pengendalian rutin, pemupukan tepat, serta tanah yang sehat, sawit akan tumbuh subur, panen stabil, dan rezeki pun terus mengalir dari kebun hijau yang terjaga.

Penulis : Dwi Hayanti
Penyuluh Pertanian Pusat

Kopi Liberika Alternatif Lain

CATATAN Begawan



Sebuah studi genetik baru pada spesies kopi liberika (Coffea liberica), yang diterbitkan di Nature Plants, menemukan bahwa liberika sebenarnya adalah tiga spesies berbeda dengan adaptasi genetik, morfologi, dan iklim unik yang mungkin menawarkan alternatif yang lebih tahan perubahan iklim dibandingkan dengan kopi arabika dan robusta.

Sementara beberapa petani sudah memproduksi kopi Liberika di tempat-tempat seperti Uganda, Sudan Selatan, India, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Pasifik, jumlahnya kurang dari 1% dari total produksi kopi global.

Para peneliti melakukan pengurutan genetik Liberica, menggunakan 353 gen nuklir dari 55 aksesi dan menggabungkan data genom dengan pengukuran morfologi dan pemetaan distribusi geografis, mereka membedakan tiga spesies terpisah: C. liberica (Liberica), C. dewevrei (excelsa) dan C. klainei.

Ketiga spesies tersebut menunjukkan berbagai toleransi terhadap perubahan iklim, dengan C. dewevrei lebih toleran terhadap kekeringan dan beradaptasi dengan curah hujan yang lebih rendah daripada C. liberica. Sementara C. liberica mungkin lebih baik beradaptasi dengan musim curah hujan yang lebih tinggi dan musim kemarau yang lebih panjang di dataran rendah.

Para penulis studi menulis bahwa kedua spesies tersebut kemungkinan mencakup populasi yang beradaptasi terhadap perbedaan iklim regional, faktor abiotik lainnya (misalnya, tanah), dan berbagai interaksi biotik (misalnya, kejadian dan resistensi hama dan penyakit). Hal ini mungkin khususnya berlaku untuk C. dewevrei, yang memiliki wilayah sebaran alami yang luas di seluruh Afrika Tengah.

Yang terpenting, Liberika dan Excelsa memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian kopi di daerah yang kurang cocok untuk Arabika atau Robusta, terutama di dataran rendah dengan iklim yang lebih panas dan basah.

Penelitian lebih lanjut diperlukan pada C. klainei, yang kurang dikenal dan kurang tersampel, tetapi mungkin menawarkan peluang tambahan sebagai alternatif Arabika dan Robusta. Uji lapangan juga diperlukan untuk mengonfirmasi sifat adaptasi iklim pada C. dewevrei dan C. liberika. Namun, spesies ini menawarkan alternatif potensial, serta peluang baru bagi program pemuliaan kopi untuk membantu mengamankan pasokan kopi di masa depan. **Sumber : phys.org**

ADA APA DENGAN BERAS?



Akhir-akhir ini masyarakat kembali diributkan soal beras. Bagi masyarakat Indonesia, beras memang makanan pokok. Bahkan ada ungkapan jika belum makan nasi (beras), maka belum makan. Beras menjadi sumber karbohidrat yang sangat superior ketimbang produk pangan lainnya.

Karena itulah, beras menjadi komoditas pangan strategis. Bahkan lebih dari itu, beras juga menjadi komoditas politik. Sejarah kelam Pemerintahan Indonesia dengan jatuhnya dua Presiden RI yakni Soekarno dan Soeharto karena gara-gara beras. Kenaikan harga pangan khususnya beras membuat masyarakat bergolak dan menurunkan pemerintahan.

Sepanjang Pemerintah Indonesia, pasca Orde Baru, beras tetap memegang peranan penting dalam komoditas pangan. Ibaratnya beras menjadi imam dari komoditas pertanian lainnya. Kenaikan harga beras akan mendorong komoditas lain untuk ikut bergerak naik. Pemerintah pun menjaga ketat stabilitas harga beras, karena akan berdampak pada inflasi.

Bahkan kenaikan harga beras akan sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan, sehingga memiliki dampak besar terhadap indeks kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kenaikkan harga beras dapat menurunkan daya beli masyarakat dengan pendapatan terbatas.

Karena itu, pemerintah memantau dengan ketat pergerakan harga beras. Bahkan untuk menjaga stabilitas harga beras, target swasembada pangan (beras) menjadi prioritas utama. Begitu juga dengan Pemerintahan Prabowo Subianto, genderang swasembada pangan (beras) terus ditabuh.

Targetnya bukan hanya 5, 4 atau 3 tahun, tapi dalam 1 tahun sudah bisa mencapai swasembada beras. Dengan masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) di sektor pertanian, tidak mudah bisa menembus target tersebut. Dengan berbagai strategi, Kementerian Pertanian optimis produksi padi akan meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional periode Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.

Kenaikan produksi tersebut kemudian diikuti dengan serapan atau pembelian gabah/beras oleh Bulog yang juga terdongkrak hingga mencapai 2,6 juta ton setara beras. Dengan sisa beras impor tahun lalu, saat ini cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton.

Mengapa Harga Beras Naik?

Di tengah optimistis pemerintah dengan kenaikan produksi dan stok melimpah, justru pada pertengah tahun harga beras bergerak naik. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kemudian meminta Bulog menggelontorkan beras pemerintah, baik dalam bentuk bantuan pangan dan beras SPHP.

Total beras SPHP yang akan dilepas di pasar mencapai 1,3 juta ton selama sisa bulan di tahun 2025. Sedangkan beras bantuan pangan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia dengan masing-masing mendapatkan 10 kg/bulan.

Di tengah gejolak harga beras saat produksi berlimpah tersebut mencuat isu oplosan beras. Kasus beras oplosan tersebut menggelinding setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan melontarkan pernyataan kasus 212 merek beras ditemukan tidak sesuai dengan standar mutu dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia.

Kasus oplosan beras yang ramai akhir-akhir ini telah menarik Presiden Prabowo Subianto untuk ikut turun tangan. Saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo mengungkap adanya praktik manipulasi di pasar beras nasional. Terdapat beras kualitas eceran atau medium dikemas sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga jauh di atas HET.

Presiden yang pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini menilai, kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penipuan, kejahatan ekonomi, dan bentuk penghianatan terhadap bangsa. Baginya, permainan harga oleh penggilingan padi besar dan produsen beras nakal telah merugikan petani

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembenahan ekosistem perberasan nasional dilakukan bukan hanya untuk menjaga stabilitas pangan, tetapi juga demi memastikan kesejahteraan petani terus meningkat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun ekosistem perberasan tidak sehat karena adanya praktik curang seperti beras oplosan dan permainan harga oleh segelintir pelaku usaha besar. Akibatnya, petani dan masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan.

"Sekarang negara hadir. Petani harus sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum. Inilah yang kita benahi. Mafia pangan tidak boleh lagi menguasai rantai perberasan kita," tegasnya.

Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Polri Helfi Assegaf menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan jalan paling akhir. Sebelumnya, Polri melakukan kegiatan preemtip, preventif, kemudian baru penindakkan. Sampai kini penegakkan hukum masalah perberasan ada 25 perkara dengan 28 tersangka. Rata-rata kasusnya terkait operasional produksi beras.

"Kita tidak berharap kasusnya bertambah, harusnya dengan penegakkan hukum dapat mengerem pihak-pihak yang berniat tidak baik," ujarnya. "Kita hanya menertibkan dan tidak mencari-cari. Jadi, kita minta produsen dan distributor beras sesuai dengan standar label dengan harga yang sudah diatur. Ini harus kita perbaiki agar tidak terjadi kasus lagi," tambah Helfi.

Mengenai pro kontra oplosan beras, Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya mencoba mengumpulkan informasi mengenai masalah tersebut. "Sekarang ini di masyarakat terjadi kegaduhan dan terjadi pro kontra. Jadi penting bagi ombudsman untuk mengetahui lebih lanjut persoalan tersebut," tegasnya.

Sebab, konsen Ombudsman RI adalah bukan hanya Indonesia mampu swasembada beras sesaat, tapi berkelanjutan. "Apa artinya, swasembada kalau kemudian impor lagi. Mengapa kita tidak membuat kebijakan agar swasembada itu pencapaian kontinyu," ujarnya. **Yul**

Menahan Laju Harga Beras

Kenaikkan harga beras mencuatkan dugaan adanya pengoplosan beras, yang kemudian disinyalir adanya permainan mafia pangan. Hal itu kemudian membuat Satgas Pangan Polri turun tangan. Bahkan kasus beras oplosan tersebut telah menyeret beberapa tersangka.



Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya bahwa pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan petani dan masyarakat, sekaligus melawan praktik mafia pangan yang merugikan kedua pihak.

Amran juga mengingatkan mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis perberasan. Investigasi yang dipimpinnya menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar, dan kasus ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas. Jangan ada yang memelintir seolah kami tidak peduli konsumen. Justru karena kami ingin keadilan, kami berani melawan mafia pangan!” tegasnya.

Karena itu, kebijakan di sektor perberasan dirancang untuk menjaga keseimbangan, petani memperoleh harga gabah yang layak, sementara masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menjaga harga gabah petani di level Rp6.500/kg, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Serapan gabah oleh Bulog meningkat dua kali lipat menjadi 6.000 ton per hari.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia, harga beras di tingkat konsumen merambat naik pada awal Juli. Misalnya, harga beras per 14 Juli 2025, kualitas bawah I naik rata-rata Rp 50/kg menjadi Rp 14.550/kg, sedangkan kualitas bawah II naik Rp 100/kg menjadi Rp 14.000/kg. Sedangkan harga beras kualitas super 1 naik Rp 100/kg menjadi Rp 17.150/kg dan kualitas super II naik Rp 50/kg menjadi Rp 16.650/kg.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional juga mencatat harga beras medium di penggilingan juga mengalami kenaikan. Jika pada 9 Juli 2025 sekitar Rp 13.000/kg, maka per 15 Juli sudah mencapai Rp 13.550/kg. Begitu juga dengan harga beras premium di penggilingan naik dari Rp 14.200/kg menjadi Rp 14.380/kg.

Untuk menjaga harga di tingkat konsumen, pemerintah pun melepas stok beras cadangan pemerintah sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Pelepasan stok ini dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin. “Pemerintah menjaga dua kepentingan sekaligus: petani tidak dirugikan, rakyat tetap bisa tersenyum. Itulah keberpihakan kami,” kata Amran.

Dengan stok beras melimpah, harga yang mulai stabil, serta langkah melawan mafia pangan, Amran optimistis Indonesia mampu menjaga kedaulatan pangan. “Kami tidak hanya ingin swasembada, tapi juga kedaulatan pangan yang membuat bangsa ini berdiri tegak tanpa tekanan,” katanya.

Harga Beras Turun

Upaya pemerintah tersebut membuat harga beras mulai berangsur turun. Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 26 Agustus 2025, harga beras medium dan premium berangsur turun di 15 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga melaporkan pasar ritel modern mulai terisi kembali, bahkan harga beras turun sekitar Rp1.000/kg, berkat distribusi beras SPHP yang kini mencapai 6.000 ton per hari dan akan ditingkatkan hingga 10.000 ton/hari.

“Dua hari lalu, harga beras turun di 13 provinsi, dan kini meluas ke 15 provinsi. Saya optimistis harga akan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan, seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujar Amran.

Amran pun mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi beras SPHP agar manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat kecil, sekaligus memastikan petani tetap bangga menjalani profesinya. Dengan langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas pangan, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai negara dengan ketahanan pangan kelas dunia.

Sementara itu, Perum BULOG mencatat penyaluran harian beras SPHP hingga 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. Penyaluran Beras SPHP sepanjang tahun 2025 ini telah dilakukan sebanyak lebih dari 259 ribu ton.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah. Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

”Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh BULOG telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” kata Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani.

BULOG kata Rizal, akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau. ”Data penurunan harga di hampir dua ratus kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui BULOG berjalan efektif,” ujarnya.

Rizal menjelaskan, penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

BULOG juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer. Penyaluran juga melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

“Dengan berbagai jalur penyaluran tersebut, kita berharap akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin. Selain menjaga stabilisasi harga, kami juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah,” katanya. **Yul**

Stok Melimpah, Mengapa Harga Beras Naik?



Harga beras kembali menjadi sorotan. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat stok beras nasional masih surplus, harga di pasaran tetap merangkak naik. Pada Agustus 2025, harga beras di tingkat pedagang besar tercatat Rp15.000 per kilogram, hampir sama dengan rekor tertinggi pada 2024 yang mencapai Rp15.050 per kilogram.

Menurut pengamat sosial ekonomi pertanian, Ahmad Alamsyah Saragih, kenaikan ini tak lepas dari masalah distribusi. “Kalau stok ada tapi tidak dikeluarkan, tentu harga akan naik. Stok bisa saja tertahan, baik di tingkat pemerintah, pedagang, maupun petani. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan stok, motifnya apa?” katanya saat Diskusi di Ombudsman RI bertema Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional, Selasa (26/8).

Jika pemerintah akhirnya mengeluarkan stok, maka tidak akan langsung membanjiri pasar. Kemungkinan akan terjadi keterlambatan peredaran beras di pasar atau *circulation delay*. Apalagi, data surplus yang dirilis BPS masih memiliki *margin of error* yang tidak bisa diabaikan. “Kalau margin error data BPS 5–8 persen, surplus 5,3 persen bisa saja sebenarnya tipis di pasar. Kalau tipis, harga pasti bergejolak,” ujarnya.

Selain distribusi, faktor kualitas gabah juga memengaruhi harga. Alamsyah mencontohkan, kebijakan pemerintah menetapkan harga gabah kering panen Rp6.500/kg belum termasuk ongkos angkut. Apalagi kemudian pemerintah menetapkan harga gabah tersebut adalah *any quality*.

Padahal jika dihitung dengan rasio rendemen, biaya distribusi, dan margin pemasaran, harga beras akan tinggi. Jadi menurut Alamsyah, bukan hanya ada permasalahan di pasokan, tetapi memang harga gabah memang tinggi.

“Pertanyaan mengapa harga tinggi, stok beras pemerintah tidak segera dikeluarkan. April-Mei saat harga mulai naik, tidak ada SPHP. Apa yang terjadi? Baru Agustus pemerintah baru mengeluarkan 1,3 juta ton beras SPHP,” katanya.



Ahmad Alamsyah Saragih

Namun, ia menekankan kenaikan harga tidak semata-mata merugikan. Sebab, harga tinggi justru bisa menguntungkan petani. Namun persoalannya, di pasar stoknya tipis, sehingga konsumen yang paling terbebani. “Persoalannya bukan karena harga tinggi saja, tapi juga barang tidak ada di pasar. Ini pasti ada bottle neck,” tegasnya.

Alamsyah juga menyoroti lambatnya realisasi program penyaluran beras pemerintah (SPHP). Ia menyebut, harga sudah mulai naik sejak Mei, tetapi intervensi pemerintah baru digelontorkan pada Agustus. “Ini persoalan *administration delay*. Kalau saja respons lebih cepat, gejolak harga bisa diredam,” paparnya.

Meski begitu, ia optimistis harga beras akan terkoreksi pada musim panen mendatang. BPS memprediksi produksi September naik 3,19 persen. Jadi penurunan harga beras, menurut Alamsyah, bukan semata karena bantuan beras, tapi memang ada tambahan pasokan dari panen raya.

Ke depan, Alamsyah menyarankan pemerintah lebih sigap dalam mengatasi dua hal *administration delay* dan *circulation delay* dalam perberasan. Selain itu, BPS juga diharapkan memperbaiki metode sampling agar data stok beras lebih presisi, sehingga kebijakan pangan bisa lebih tepat sasaran.

Harga Naik, Intervensi Terlambat

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI), Sutarto Alimoeso, menilai fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini dipicu oleh keterbatasan pasokan akibat produksi musiman. Sejak Mei hingga Juli, produksi beras nasional berada di bawah kebutuhan, sehingga berdampak pada ketersediaan di pasar.

“Kalau *supply* kurang sementara demand tetap, pasti terjadi pergerakan harga. Itulah yang sekarang kita hadapi,” ujar Sutarto. Pada periode pascapanen April–Mei menurut mantan Dirut Perum Bulog, biasanya terjadi penurunan produksi, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi.

Di kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya segera mengeluarkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga. Namun, ia mengingatkan stok beras yang ada di masyarakat belum tentu siap dijual. Karena itu, pemerintah memegang peran penting sebagai penyeimbang pasar.

“Sejak Mei kami sudah memberikan masukan agar stok cadangan pemerintah segera dilepas. Kalau terlambat, harga akan tertekan naik,” tegasnya. Bahkan ia menilai, pelepasan stok saat ini sebenarnya sudah terlambat karena sebentar lagi panen raya.

Selain faktor pasokan, Sutarto menyoroti faktor psikologis yang sering memengaruhi harga beras. Begitu ada masalah kecil dengan beras itu akan berpengaruh. Misalnya, masalah beras oplosan yang berpengaruh luar biasa kepada pelaku, terus terjadi kurangan pasokan ke riteil itu terus terjadi viral, dan pasti akan berpengaruh.

Sutarto juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam melakukan pembelian gabah. Jika pemerintah justru membeli ketika produksi menurun, hal ini dapat memperburuk situasi. Karena itu, pemerintah harus mengambil langkah simultan, mulai dari kebijakan masalah HET dan kebijakan pengadaan dalam negeri, serta pelepasan stok beras.

Perpadi juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap praktik spekulasi, termasuk jual beli gabah dengan harga terlalu tinggi yang berpotensi menghasilkan beras bermutu rendah. Ke depan, Sutarto berharap adanya ekosistem perberasan yang adil bagi seluruh pelaku, mulai dari petani, penggilingan padi, distributor, hingga konsumen.

“Petani harus tetap untung wajar, penggilingan bisa beroperasi, distribusi berjalan lancar, dan konsumen mendapatkan harga yang terjangkau. Semua harus seimbang,” pungkasnya.

Herman/Yul

Strategi Intervensi Pasar

Perlu Dievaluasi



Kenaikkan harga beras, meski stok Bulog disebut cukup besar menjadi paradoks yang terjadi saat ini. Upaya pemerintah meredam gejolak harga dengan menggelontorkan beras SPHP dinilai terlambat.

Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian Husein Sawit menyoroti persoalan penyaluran beras Bulog yang dinilainya tidak efektif dalam meredam gejolak harga di pasar. Meskipun stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup besar, distribusinya lambat dan tidak terarah.

"Stok Bulog memang besar, tapi penyalurannya sangat terlambat. Seharusnya api dipadamkan ketika masih kecil. Kalau dibiarkan, makin sulit diturunkan. Apalagi stok antar musim pelaku usaha hampir kosong, sehingga penetrasi pasar lemah," ujar Husein.

Husein memperingatkan, jika tidak ada langkah cepat, gejolak harga akan mencapai puncaknya pada November hingga Januari. "Bulog pasti kewalahan menghadapi lonjakan permintaan di periode tersebut," tambahnya.

Salah satu instrumen intervensi pemerintah adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, program ini juga tak lepas dari masalah. Husein menyoroti dua kelemahan mendasar, kualitas dan birokrasi. "Beras SPHP tidak saja terbentur dengan kualitas yang rendah, tapi juga proses penyalurannya sangat birokratis dan tidak fleksibel," ungkapnya.

Akibatnya, meskipun program ini dirancang untuk menekan harga di pasar, distribusinya justru tersendat dan penyerapannya rendah. "Kalau kualitas tidak menarik dan mekanisme berbelit, wajar kalau penyebarannya minim," katanya.

Husein mengingatkan, cadangan beras pemerintah (CBP) seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi besaran kuantitas, tetapi juga kualitas. Menurutnya, dominasi beras premium di gudang Bulog akan membuat intervensi lebih kuat dan efektif. "CBP yang kuat itu bukan cuma banyak, tapi juga bermutu. Kalau yang disalurkan kualitasnya rendah, pasar tetap tidak akan stabil," tegasnya.

Selain soal kualitas, ia menyebut ada dua kunci dalam penyaluran stok CBP: pertama, distribusi langsung ke rumah tangga miskin melalui skema subsidi terarah seperti bansos atau raskin. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu menyerbu pasar untuk mendapatkan beras murah.

Kedua, intervensi melalui operasi pasar. Namun, targetnya bukan pedagang per pedagang, melainkan pasar utama. Sebab, pasar beras itu sangat terintegrasi. Jika satu pasar diguyur stok, maka efeknya bisa mengalir ke pasar lain. Karenanya, pemerintah seharusnya fokus intervensi di pasar grosir besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan kota-kota utama lain.

Selain penyaluran untuk stabilisasi harga, Husein mengingatkan soal disposal stock atau kelebihan stok yang berpotensi menurunkan mutu beras di gudang Bulog. Selama ini, belum ada strategi jelas dari pemerintah tentang cara melepaskan kelebihan stok agar tidak membebani Bulog maupun fiskal negara.

"Kalau stok berlebih terlalu lama disimpan, kualitasnya turun. Ini membebani Bulog dan pada akhirnya fiskal. Pemerintah perlu memikirkan mekanisme pelepasan stok, entah lewat ekspor, konversi ke produk olahan, atau skema lain yang lebih efisien," paparnya.

Husein menawarkan solusi konkret. Pertama, penyaluran CBP harus lebih *targeted,* langsung ke rumah tangga miskin, agar tak menambah tekanan di pasar. Kedua, operasi pasar perlu difokuskan pada pasar grosir besar yang punya efek domino. Ketiga, kualitas beras Bulog harus ditingkatkan agar intervensi lebih efektif.

"Intinya, jangan asal banyak. Harus ada strategi jangka pendek untuk stabilisasi, sekaligus jangka panjang agar Bulog tidak terus terbebani," tuturnya.

Masalah beras bukan sekadar soal pangan, melainkan juga soal psikologi publik. Ketika harga naik dan pemerintah terlihat lamban merespons, kepercayaan masyarakat pun tergerus. "Stabilitas beras adalah stabilitas sosial. Kalau ini terguncang, dampaknya bisa jauh lebih luas," katanya.

Kebijakan belum Konsisten

Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras dinilai belum konsisten. Sejak awal 2025, sejumlah keputusan terkait harga pembelian gabah, operasi pasar, hingga penyaluran bantuan pangan justru menimbulkan dilema baru di lapangan.

Pengamat Pertanian Khudori menilai, jika pola kebijakan seperti ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi krisis pasokan beras di akhir tahun. Misalnya, awal Januari 2025, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500/kg. Semula, kebijakan ini disertai syarat kualitas dan potongan harga (rafaksi).

Namun, keputusan itu tak bertahan lama. Melalui Instruksi Presiden, syarat kualitas dan rafraksi dihapus, sehingga gabah dengan kualitas apa pun bisa diserap dengan harga yang sama.

Pada saat yang hampir bersamaan, Presiden juga memutuskan agar operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijalankan di Januari dan Februari. Alasannya, periode tersebut adalah masa paceklik yang rawan gejolak harga. Targetnya, setiap bulan 150 ribu ton beras disalurkan, ditambah penyaluran bantuan pangan beras untuk 16,3 juta keluarga penerima manfaat.

"Operasi pasar memang sempat berjalan Januari hingga pekan pertama Februari dengan total sekitar 180 ribu ton. Tapi memasuki pertengahan Februari dihentikan, dan baru dijalankan lagi setelah harga di pasar terlanjur naik tinggi. Bantuan pangan beras bahkan belum sempat disalurkan," tutur Khudori.

Kebijakan kenaikan HPP gabah otomatis memicu kenaikan harga pembelian Bulog, dari Rp11 ribu menjadi Rp12 ribu/kg. Namun, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tak langsung menyesuaikan. HET baru dinaikkan belakangan, khusus untuk beras medium.

Dalam perhitungan Khudori, sepanjang 2023–2025 kenaikan HPP gabah sudah mencapai 47%. Sementara itu, HET beras medium hanya naik 38%, dan HET beras premium bahkan cuma 16%. "Dari sisi petani, mereka memang diuntungkan dengan kenaikan HPP. Tapi di hilir, pedagang dan penggilingan justru terhimpit HET. Mereka kesulitan menjual sesuai harga pasar, padahal biaya produksi sudah naik," jelasnya.

Masalah tak berhenti di situ. Dengan adanya kasus penemuan 212 merek beras oplosan di pasar. Temuan ini sempat menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun, menurut Khudori, hingga kini Satgas belum menemukan adanya praktik penimbunan besar-besaran. "Ini justru indikasi stok beras di pasar memang terbatas, bukan karena ditahan-tahan," tegasnya.

Selain persoalan harga dan distribusi, Khudori juga menyoroti kebijakan pembelian gabah any quality. Tanpa standar kualitas, petani cenderung menjual gabah dengan mutu lebih rendah. "Kalau kualitas gabah turun, rendemen ikut turun. Ujungnya, produksi beras nasional bukan hanya berkurang jumlahnya, tapi juga menurun kualitasnya. Dampaknya tetap sama pasokan ke pasar berkurang," katanya. **Gsh/Herman/Yul**



55 TAHUN SINAR TANI

Tanggal 29 Agustus menjadi momen bersejarah bagi Tabloid Sinar Tani. Pada tahun ini, tanpa terasa tabloid yang lahir dari Kementerian Pertanian ini telah berusia 55 tahun. Selama itu juga, Sinar Tani setia menemani penyuluh dan petani di seluruh nusantara.



Perjalanan panjang selama 55 tahun telah ditempuh Tabloid Sinar Tani menemani penyuluh dan petani. Menengok sejarahnya berdirinya Tabloid Sinar Tani, tidak lepas dari kebijakan Kementerian Pertanian yang mengangkat penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada tahun 1970.

Saat itu, Menteri Pertanian, Toyib Hadiwijaya menyadari pada awal REPELITA I, kondisi aparat pertanian, baik kualitas dan kuantitas masih sangat kurang, baik pengetahuan dan teknologi pertanian masih terbatas. Begitu juga kelembagaan petani-nelayan belum terbentuk dan penyuluhan belum berkembang.

Dalam rangka *Improvement and Strengthening of Agricultureal Extension Activitie*s pada tahun 1970, Menteri Pertanian kemudian mengangkat secara besar-besaran PPL yang berperan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan. Bersamaan dengan itu diterbitkan surat kabar Sinar Jaya (Sinar Tani,red) sebagai bahan informasi bagi PPL.

Pimpinan Departemen Pertanian saat itu (Kementerian Pertanian) melihat pentingnya media massa khusus pertanian menjadi bahan bacaan untuk penyuluh pertanian. Akhirnya Surat Kabar bernama "SINAR DJAJA" diluncurkan pada 29 Agustus 1970. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Sinar Tani. Namun pada 2 April 1986 nama "SINAR DJAJA" berganti menjadi "SINAR TANI"

Dengan demikian, penyuluh pertanian dan Sinar Tani merupakan dua serangkai utuh, karena lahir hampir bersamaan waktunya. Bahkan dalam tugasnya, PPL selalu dibekali dengan bahan informasi dari Sinar Tani. Sebagai dua serangkai, Tabloid Sinar Tani dan PPL saling mendukung dan saling mengisi, karena keduanya saling membutuhkan. Bahkan tabloid ini kemudian menjadi poros atau sumbu penghubung antara aparat (kebijakan), peneliti (teknologi/ inovasi), PPL dan petani.

Setidaknya ada dua tugas utama Sinar Tani. Pertama, memperkuat dan memperlancar arus informasi hasil-hasil penelitian pertanian, berupa teknologi baru sampai ke konsumen yaitu petani melalui penyuluh pertanian. Kedua, menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada penyuluh untuk disampaikan ke petani.

Sejalan dengan itu, Tabloid Sinar Tani menjadi penyedia bahan informasi mengenai petunjuk intensifikasi dan kebijakan pembangunan pertanian. Bahan informasi tersebut untuk mendukung tugas sekaligus mengasah kemampuan penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di pedesaan.

Transformasi Sinar Tani

Sebagai sebuah media massa, usia yang telah melewati setengah abad tersebut bukanlah muda lagi. Pasang surut tabloid yang selama ini dekat dengan penyuluh dan pertanian ini telah dialami. Apalagi kini banyak media massa, khususnya cetak yang terpasang undur diri menemani pembaca setia.

Di tengah gempuran media digital, Tabloid Sinar Tani yang awal penerbitannya tahun 1970 masih dalam bentuk Surat Kabar Mingguan (SKM) bernama Sinar Djaja, kemudian menjadi Sinar Jaya, kini terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Bukan hanya terbit dalam bentuk cetak, tabloid ini juga hadir menemani pembaca dalam bentuk online (www.tabloidsinartani.com). Kehadiran Tabloid Sinar Tani online ini diharapkan memberikan nuansa berbeda bagi pembaca dan pelanggan Sinar Tani yang ingin mengetahui informasi dunia pertanian lebih cepat.

Salah satu upaya mengantisipasi perkembangan media massa yang terus berubah dengan era digital, Tabloid Sinar Tani pun menghadirkan edisi e-Paper. Pengembangan Tabloid Sinar Tani e-Paper merupakan pengembangan Tabloid Sinar Tani cetak yang hanya terbit 16 halaman.

Dengan e-paper, beberapa rubrik yang tidak bisa hadir di edisi cetak bisa diakomodasikan di edisi ini. Edisi Sinar Tani e-paper terbit sebanyak 20 halaman atau ada penambahan 4 halaman dari edisi cetak. Dengan tambahan halaman diharapkan memberikan informasi lebih banyak kepada pembaca.

Di era digital, Tabloid Sinar Tani juga berupaya mengembangkan informasi melalui media sosial. Dari mulai Facebook tabloidsinartani, twitter, Tiktok, telegram dan Instagram. Bahkan Tabloid Sinar Tani juga telah tergabung dalam 57 WA group. Sinar Tani juga hadir dalam Youtube SINTATV.

Harapannya, penyebaran berita melalui media sosial tersebut, selain sebagai ajang promosi juga meningkatkan pembaca. Dengan demikian pembaca yang sudah berinteraksi dengan brand Tabloid Sinartani akan mengunjungi website. Berbagai upaya tersebut diharapkan Tabloid Sinar Tani tetap menjadi bacaan utama bagi pelaku usaha pertanian.

Dengan makin ketatnya persaingan media khusus pertanian, Tabloid Sinar Tani tetap menjadi sumber informasi pertanian terpercaya bagi penyuluh pertanian, petani dan *stakeholder* pertanian.

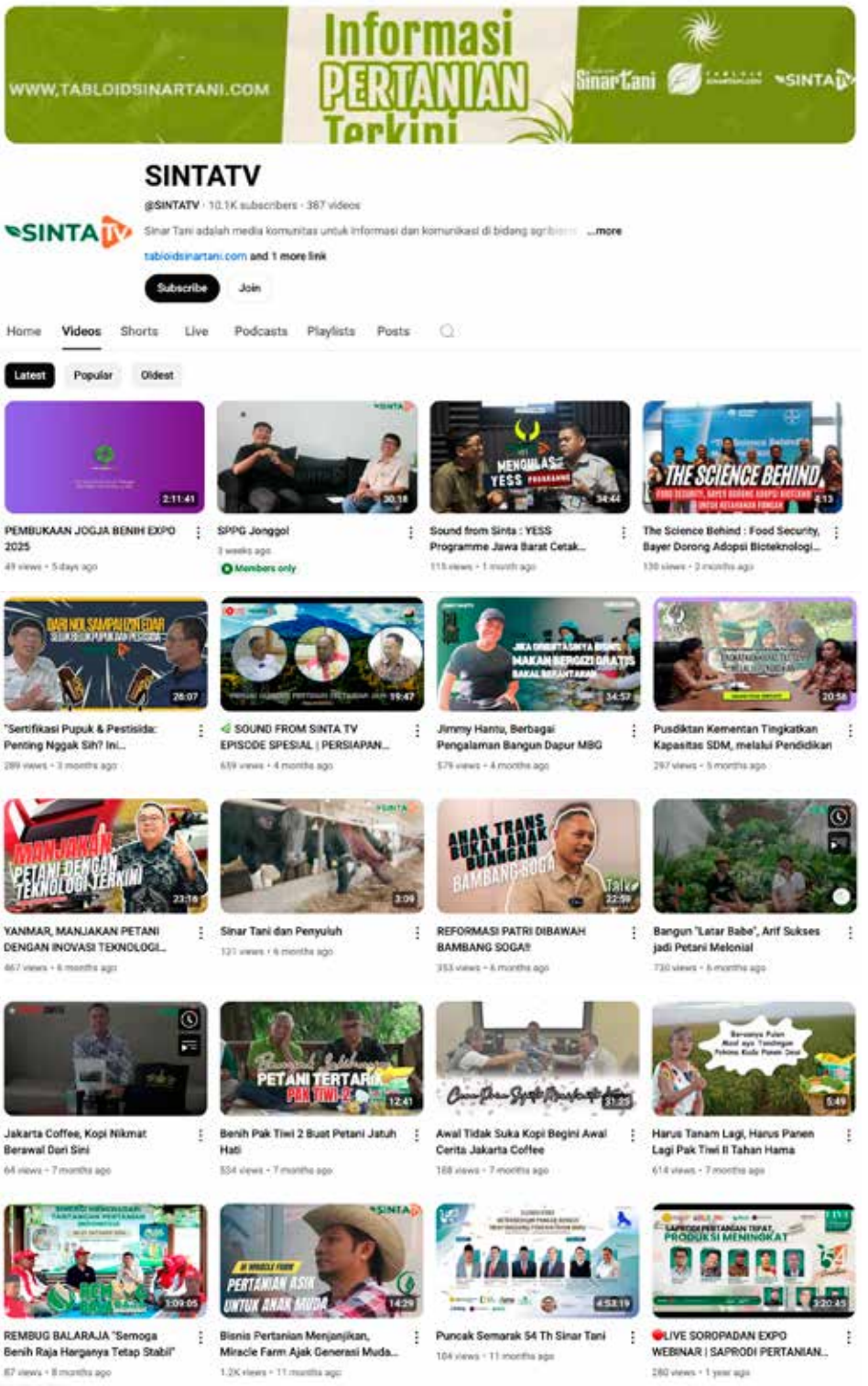
Yul

SINTA TV

Tahun 55 Sinar Tani

Hadir Memenuhi Hasrat Pembaca

Di tengah tantangan dunia pers yang kian besar, Tabloid Sinar Tani kini tak hanya terpaku pada media cetak. Sejak musibah Covid-19 beberapa tahun lalu dan makin berkembangnya dunia digital, Sinar Tani tak ingin tertinggal dan terlindas zaman. Kini Tabloid Sinar Tani juga hadir dalam media digital.



Di era digital, selain hadirnya website www.tabloidsinartani.com, Tabloid Sinar Tani juga berupaya mengembangkan informasi melalui media sosial, baik facebook (FB), twitter maupun instagram. Bahkan kini Tabloid Sinar Tani juga tampil dalam media sosial Youtube dengan nama SINTATV.

Pada awalnya SINTATV hanya sebagai wadah memuat konten webinar selama Covid-19, namun sejak musibah tersebut mulai menurun, kontennya pun berkembang. Selain liputan di lapangan secara langsung, SINTATV juga menghadirkan podcast dengan berbagai pelaku usaha.

Alhasil SINTATV mendapat sambutan cukup baik dari kalangan pelaku usaha pertanian, khususnya Sahabat Tabloid Sinar Tani. Selama Semester I tahun 2025, tercatat telah mendapat 48.000-an jumlah kunjungan. Postingan webinar 20 video, liputan lapangan, podcast dan wawacara profile 16 kali, baik di Kantor Sinar Tani maupun lapangan. Untuk jumlah subscriber sebanyak 10.036.

Penghargaan untuk Sinar Tani

Sebagai media yang telah terverifikasi di Dewan Pers, bisa dibilang Tabloid Sinar Tani bukanlah media 'kaleng-kaleng'. Tabloid Sinar Tani telah mendapatkan Sertifikasi Dewan Pers dengan No. 124/DP-Terverifikasi/K/X/2017 diberikan kepada PT. Duta Karya Swasta sebagai penerbit Tabloid Sinar Tani. Tabloid Sinar Tani juga telah tercatat sebagai anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dengan No. 572/DKI/2019.

Berbagai penghargaan dari Dewan Pers pun berhasil disabet Tabloid Sinar Tani. Bahkan hingga tiga kali yakni pada Tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2017. Penghargaan *Bronze Winner* kategori *The Best of Special Interest Tabloid* (Media Khusus) diberikan pada ajang Indonesia Print Media Award (IPMA) pada Hari Pers Nasional.

Bukan hanya itu, Tabloid Sinar Tani juga mendapat penghargaan dari Perpusatakaan Nasional. Di tengah tantangan media massa yang kian besar di era digital ini, tabloid yang menjadi media yang konsisten dalam Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Sinar Tani dinobatkan sebagai salah satu tabloid yang penerima Piagam Penghargaan atas keaktifannya dalam melaksanakan UU No. 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, khususnya dalam Kategori Jenis Koleksi Tabloid. Penghargaan ini sebelumnya pernah diterima Tabloid Sinar Tani tahun 2006.

Satu lagi tanda kehormatan yang diberikan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional kepada Tabloid Sinar Tani pada tahun 2022. Piagam Kehormatan tersebut karena Sinar Tani telah berjasa terhadap kemajuan petani-nelayan di seluruh Indonesia.

Apa yang telah dilakukan selama 55 tahun, menjadi bukti Tabloid Sinar Tani setia dalam menemani petani-penyuluh dan ikut mendorong pembangunan pertanian. Apalagi dengan jejaring hingga ke pelosok Tanah air yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan tabloid ini.

Banyak harapan yang ditujukan kepada Sinar Tani. Misalnya, Catur Jatmiko, S.P, koordiantor penyuluh BPP Wonosobo yang berharap Sinar Tani konsisten dalam memberikan pencerahan kepada pelaku utama dan petugas pertanian.

Nurjayanti dari penyuluh pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi juga mengharapkan agar Sinar Tani lebih sering memberikan bimbingan, terutama berkaitan dengan penyuluhan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lisnae, Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan. "Semoga dapat menjadi media yang bermanfaat bagi penyuluh," katanya.

"Mantap. Semoga Sinar Tani terus bisa memberikan pemahaman dan edukasi yang bermanfaat secara terus menerus," ujar Suryati Andriani, PPL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Blasius Iskandar Sawu, PPL Kabupaten Sikka juga berharap agar Tabloid Sinar Tani terus menjaga kualitas dan relevansi informasinya, untuk memperluas SDM bagi petani dan pengusaha pertanian di era digital sesuai kebutuhan masyarakat tani.

Banyak asa dan harapan terhadap Sinar Tani. Semoga di HUT ke-55, Tabloid Sinar Tani juah menjadi lebih baik dalam menyajikan informasi mengenai dunia pertanian. **Yul**

NFA Luncurkan Direktori Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan



Saat ini NFA terus memperkuat kebijakan penanganan kerawanan pangan. Untuk mengukur kondisi kerawanan pangan tersebut, NFA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menyusun Buku Direktori Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yang didetailkan sampai dengan level kecamatan dan desa.

Dunia kini menghadapi tantangan besar ketahanan pangan. Beberapa faktor penyebabnya adalah perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, hingga perubahan daya beli masyarakat menjadi ancaman nyata yang dapat memicu kerawanan pangan. Beberapa wilayah di Tanah Air pun menghadapi persoalan tersebut.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan, eratnya hubungan antara kerawanan pangan dan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan berdampak signifikan terhadap pengurangan masyarakat rawan pangan. Sebab, pangan adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia, terjangkau, dan bergizi seimbang bagi seluruh rakyat.

"Untuk itu kami akan semaksimal mungkin memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi seluruh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) Sarwo Edhy mengungkapkan, kerawanan pangan dipicu berbagai faktor, mulai dari gangguan pasokan, keterbatasan akses fisik, keterjangkauan harga pangan, minimnya pendapatan masyarakat. "Kondisi ini akhirnya akan memperburuk tercukupinya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat," ujarnya saat Diseminasi Buku Direktori *Prevalence of Undernourishment* (PoU) di Jakarta, Kamis (14/8).

Pada kesempatan itu, NFA memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan capaian PoU terbaik, yakni Provinsi Banten, NTB, dan Bali, serta Kabupaten Sumbawa Barat, Gianyar, dan Badung. Untuk kategori penurunan PoU terbaik, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah, serta Kabupaten Mamasa, Penajam Paser Utara, dan Lebak.

NFA berharap capaian ini menginspirasi daerah lain untuk mengoptimalkan data PoU sebagai panduan kebijakan. Dengan kerja sama lintas sektor, target penurunan PoU hingga 4,41 persen pada 2029 diharapkan tercapai bahkan lebih cepat.

Tonggak Penting

Sarwo berharap, langkah ini menjadi tonggak penting untuk mendapatkan data akurat guna mendukung pengambilan kebijakan pangan dan gizi nasional yang lebih tajam dan terukur. Buku ini nantinya dapat dimanfaatkan masing-masing provinsi sebagai dasar pelaksnaan intervensi kegiatan.

PoU atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah proporsi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam persentase. Artinya, PoU menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan, sekaligus alat untuk memetakan kondisi kerawanan pangan.

BUKU SAKU DAN DIREKTORI
PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT (PoU)

SCAN ME

Dengan dasar rekomendasi yang kuat, ungkap Sarwo, para kepala daerah atau pengampu kebijakan terkait, dapat mengetahui secara presisi lokasi prioritas dan besaran populasi yang memiliki tantangan ketidakcukupan konsumsi pangan tersebar di wilayahnya.

Dalam menghitung tingkat PoU dilakukan melalui kolaborasi NFA dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Direktori yang disusun bersama BPS ini telah menghasilkan 38 buku Direktori PoU Provinsi yang didetailkan hingga tingkat kecamatan dan desa.

"Untuk pertama kalinya, data PoU disajikan hingga tingkat kecamatan dan desa, yang sebelumnya berbasis kabupaten/kota. "Saya berharap data ini menjadi peta jalan bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi program yang lebih tepat sasaran," kata Sarwo.

PoU sendiri merupakan indikator global dalam SDGs target 2.1. Artinya indikator ini dapat digunakan secara global untuk membandingkan kerawanan pangan antar wilayah. Kerawanan pangan yang diukur dari ketidakcukupan pangan di Indonesia pada 2024 sebesar 8,27 persen. Artinya ada sebanyak 8,27 persen penduduk Indonesia dengan konsumsi yang tidak cukup energi untuk hidup secara sehat dan beraktifitas secara normal.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis menambahkan, PoU telah menjadi indikator kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam mengukur tingkat kerawanan pangan. Hingga kini menunjukkan tren positif. Pada 2024, angka PoU sebesar 8,27 persen, membaik dibanding tahun sebelumnya 8,53 persen.

Sesuai mandat RPJMN, terdapat target capaian angka PoU. Jika pada tahun 2025 angka PoU sebesar 7,21 persen, maka pada tahun 2029 menjadi hanya 4,41 persen. Namun menurut Nita, penurunan PoU ini tidak hanya fokus pada angka, tapi harus dilakukan program dan aksi bersama antara pusat dan daerah.

Angka ini menjadi indikator penting untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, uoaya NFA tidak berhenti pada penyusunan data. Namun menurut Nita, angka PoU tidak hanya sebatas angka atau sebatas publikasi, tetapi menjadi dasar bersama untuk bergerak dalam menyusun kebijakan, program, dan intervensi nyata kepada masyarakat.

Nita menjelaskan, PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu yang mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Faktor yang Mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka PoU. Diantaranya, struktur usia penduduk, komposisi gender, aktivitas fisik rata-rata, tingkat tinggi badan rata-rata dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, kata Nita, menurunkan PoU berarti tidak hanya meningkatkan rata-rata konsumsi energi populasi, tetapi juga mengurangi ketimpangan distribusinya.

Untuk itu, integrasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah harus disiapkan mulai dari proses perencanaan sampai ke penganggaran (APBN, APBD I, APBD II) menjadi penting. Jadi, keberhasilan pencapaian penurunan angka PoU terletak pada kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh mitra pentahelix baik pusat maupun daerah melalui berbagai intervensi kegiatan/program dan strategi.

Nita menegaskan, karena PoU menjadi salah satu Indikator utama pembangunan dalam RKPD 2026, sehingga di tingkat Pemda semua sub kegiatan urusan pangan dalam pedoman penyusunan RKPD dapat digunakan untuk mendukung pencapaian target PoU.

Peran Pemda dalam upaya penurunan PoU yaitu penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional; internalisasi kebijakan ketahanan pangan; optimalisasi pelaksanaan indikator kinerja pangan; perlunya peningkatan sinergi antara pusat dan daerah; dan optimalisasi potensi daerah dan peluang kerja sama daerah.

Nita mengakui, tantangan utamanya dalam upaya PoU adalah memastikan ketersediaan pangan yang cukup, akses ekonomi yang terjangkau, serta distribusi pangan yang menjangkau semua kelompok, khususnya di wilayah dengan hambatan geografis atau infrastruktur. Metode PoU hanya menilai kecukupan energi tanpa mempertimbangkan kualitas gizi, sehingga meskipun indikator ini membaik, masalah kekurangan gizi mikro dapat tetap terjadi.

Karena itu, upaya menurunkan PoU perlu menggabungkan peningkatan konsumsi energi yang memadai dengan perbaikan pola distribusi pangan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di bagian bawah distribusi konsumsi, dapat memenuhi kebutuhan energinya secara berkelanjutan. **Direktorat Kewaspadaan Pangan NFA**

Teknologi Pascapanen Padi: Menjaga Mutu dan Mengurangi Susut

Penulis: **Dody Dwi Handoko**
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi (BRMP), Kementerian Pertanian

Penerapan teknologi pascapanen yang tepat dapat meningkatkan mutu beras, memperpanjang umur simpan, dan mengurangi kerugian hasil panen.

Setelah berbulan-bulan merawat tanaman padi, hasil panen yang melimpah bisa merugi jika pascapanennya tidak dikelola dengan baik. Pemanenan yang terlambat, pengeringan yang salah, atau penyimpanan yang kurang tepat dapat menurunkan mutu beras, menjatuhkan harga jual, dan membengkakkan kerugian petani.

Beras yang kita konsumsi setiap hari telah melalui serangkaian proses pascapanen, mulai dari pemanenan, perontokan, pengeringan, penyimpanan, hingga penggilingan. Bersama faktor varietas dan budidaya, pascapanen memegang peranan penting dalam menentukan kualitas beras.

Mengapa Pascapanen Sangat Penting

Mutu beras yang dihasilkan petani sangat dipengaruhi oleh cara penanganan setelah panen. Tanpa penanganan yang tepat, susut hasil bisa mencapai 10 persen atau lebih, sementara harga jual turun karena kualitas beras menurun.

Penanganan pascapanen yang kurang tepat dapat menyebabkan pemanenan terlambat dan tanaman rebah. Gabah dapat pecah, retak, atau tercecer saat proses perontokan. Pada saat pengeringan, gabah dapat berubah warna, kadar airnya tidak seragam, dan berbau asam atau bahkan membusuk. Penyimpanan gabah kering panen yang tidak tepat dapat menyebabkan serangan hama seperti kutu dan jamur serta peningkatan kelembapan. Penggilingan gabah yang tidak sesuai prosedur menghasilkan banyak beras patah, dan derajat sosoh tidak memenuhi standar mutu.

Tahapan Pascapanen Padi

Pemanenan dilakukan saat sekitar 80 hingga 85 persen gabah dalam malai telah berubah warna menjadi kuning tua, atau kadar airnya mencapai 20 hingga 25 persen. Panen sebaiknya dilakukan setelah embun pagi menguap, pada cuaca cerah, dan tidak tertunda terlalu lama. Petani dapat memanen secara manual menggunakan sabit yang kemudian dilanjutkan dengan perontokan, atau menggunakan mesin *combine harvester* yang memotong dan merontokkan sekaligus. Penggunaan teknologi ini sangat membantu saat panen raya, terutama ketika tenaga kerja terbatas, sekaligus dapat mengurangi susut hasil.

Perontokan sebaiknya dilakukan pada hari yang sama setelah pemanenan. Mesin perontok seperti power thresher atau pedal thresher dapat digunakan untuk mempercepat proses. Lantai perontokan idealnya dilapisi terpal agar gabah tidak tercecer, kemudian gabah dibersihkan dari malai, daun, dan kotoran.

Pengeringan merupakan tahap paling kritis dalam pascapanen. Gabah dengan kadar air 12 hingga 13 persen dapat disimpan hingga 8 sampai 12 bulan. Penjemuran dilakukan di atas terpal atau lantai jemur dengan ketebalan sekitar 5 cm, dan dibalik setiap 30 menit. Bila cuaca kurang mendukung, pengeringan dapat menggunakan mesin seperti bed dryer berbahan bakar sekam. Untuk gabah benih, suhu pengeringan maksimal 42°C, sedangkan untuk gabah konsumsi maksimal 50°C agar mutu tetap terjaga.

Penyimpanan dilakukan dengan menempatkan gabah dalam karung yang disusun di atas palet kayu, diberi jarak dari dinding, dan ruangan memiliki ventilasi yang cukup. Gabah kering lebih baik disimpan dalam bentuk gabah dibanding beras sosoh, karena sekam berfungsi melindungi isi gabah dari serangan hama dan menjaga mutu lebih lama. Sistem penyimpanan hermetik atau kedap udara juga terbukti efektif mencegah serangan hama.

Penggilingan gabah dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengupasan sekam dan penyosohan. Proses ini biasanya menghasilkan mutu beras yang lebih baik. Untuk beras pecah kulit seperti beras merah dan hitam, proses penyosohan hanya dilakukan sebagian agar kandungan serat, protein, dan antioksidan tetap tinggi. Mesin pemisah gabah (paddy separator) dan mesin seleksi warna (colour sorter) digunakan untuk memastikan beras bebas dari gabah dan sesuai standar mutu.

Teknologi untuk Lahan Rawa

Pascapanen di lahan rawa, baik lebak maupun pasang surut, memerlukan penanganan khusus karena genangan air sering terjadi menjelang panen. Kondisi ini menyebabkan kadar air gabah sangat tinggi, lebih dari 22 persen, sehingga menyulitkan penggunaan alat panen seperti combine harvester.

Panen manual menggunakan sabit menjadi alternatif, namun gabah harus segera dikeringkan di lokasi yang benar-benar kering agar tidak menyerap uap air dari tanah. Brangkasan dan gabah juga perlu dijauhkan dari genangan untuk mencegah kerusakan selama proses pascapanen.

Manfaat bagi Petani

Penerapan teknologi pascapanen padi yang tepat dapat mengurangi susut hasil hingga 5 hingga 10 persen. Mutu dan harga jual beras dapat lebih terjaga, umur simpan gabah lebih panjang, serta penggunaan tenaga kerja dan waktu lebih efisien. Selain itu, penerapan teknologi ini membantu memastikan beras sesuai standar mutu pasar.

Dengan manajemen pascapanen yang baik, petani tidak hanya menjaga kualitas hasil panen, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan daya saing. Investasi pada teknologi pascapanen merupakan langkah penting menuju sistem pertanian padi yang lebih efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan.



Kolom

Bicara Beras, Bicara Kerja Keras



Oleh: **Memed Gunawan**

Padi bukanlah tanaman yang paling manja, tetapi memelihara tanaman padi bukan hal yang mudah. Pengairan, kesuburan tanah, gulma, hama dan penyakitnya harus menjadi perhatian serius selama proses produksi.

Tekstur tanah, kedalaman efektif, drainase, pH, kemiringan, dan ketersediaan air sesuai kriteria teknis menjadi penentu keberhasilan. Padi sawah memerlukan pH sekitar netral, drainase terkontrol, dan suplai air stabil. Teknologi, dalam kapasitas terbatas bisa menciptakan kondisi alam yang cocok untuk tanaman ini, selain itu merekayasa benih agar sesuai dengan kondisi agroekologi yang ada juga merupakan alternatif dalam meningkatkan produktivitas padi.

Iklim, tata ruang dan kesesuaian lahan sudah jadi acuan masyarakat lokal secara turun temurun dalam menentukan lokasi terbaik dalam membuka daerah persawahan. Sampai saat ini padi tetap sebagai komoditas strategis karena merupakan pangan pokok yang ternyata tidak mudah tergantikan oleh komoditas lain. Lalu bagaimana dengan modernisasi?

Modernisasi pertanian tidak hanya bertumpu pada aspek teknis dengan modal, peralatan dan teknologi terkini, tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah kesiapan SDM untuk mampu melakukan pengelolaan modern pula. Apalagi jika dihadapkan pada skala usaha besar, karena petani lokal adalah petani yang umumnya mengolah lahan sawah dengan luasan terbatas. Diperlukan langkah penyesuaian pola pengelolaan baru yang berbeda. Di sinilah peran penyuluhan, dan karena proses penyuluhan memerlukan waktu, tidak "ujug-ujug", maka proses modernisasi pertanian harus berjalan paralel dengan penyuluhan. Modernisasi Pertanian tanpa penyuluhan adalah kemustahilan.

Infrastruktur menjadi persyaratan penting. Jaringan irigasi dan jalan usahatani menjadi bagian yang tidak mungkin dilupakan. Layanan irigasi untuk lahan seluas 7,1 juta ha adalah pekerjaan besar. PUPR membangun 1,8 juta ha jaringan baru (2015–2019) dan rehabilitasi kurang lebih 3 juta ha. Porsi irigasi yang bersumber dari waduk baru sekitar 11%, dan ditargetkan naik seiring tambahan bendungan. Kondisi secara nasional, sekitar 46% jaringan irigasi tercatat rusak (ringan sampai berat) sehingga aspek rehabilitasi krusial dalam modernisasi pertanian.

Biaya logistik nasional masih relatif tinggi, sekitar 14 persen PDB (menurut kajian 2024), sehingga penguatan jalan desa dan akses pasar sangat berdampak pada biaya angkut per kilogram. Kehilangan pasca panen padi masih di atas10 persen. Semua ini memberi isyarat bahwa intensifikasi masih mempunyai ruang untuk meningkatkan produksi.

Di atas semua itu kelembagaan merupakan aspek yang tidak terpisahkan. Keberhasilan seluruh proses mulai dari produksi sampai dengan pemasaran produk, dipengaruhi oleh bekerjanya kelembagaan penyuluhan, pelayanan penyediaan input, produksi, pemasaran dan distribusi yang efektif.

Beras adalah komoditi yang sensitif dan bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pasar beras internasional juga adalah pasar yang tipis, sehingga harga bisa berfluktuasi drastis. Itulah sebabnya swasembada beras menjadi pilihan strategis pangan nasional. Ringkasnya: Kita punya peluang dan bisa untuk swasembada beras.

Jalan-jalan ke **PASAR NGASEM**, Wisata Kuliner di Kota Gudeg

Yogyakarta, bukan hanya dikenal sebagai Kota Pelajar, tapi juga sebagai kota wisata yang bikin kangen. Bahkan Kla Projek mengabadikan dalam lantunan lagu berjudul Yogyakarta. Bait-bait lagu yang puitis tersebut kerap membawa angan ingin kembali ke kota tersebut.





Bukan hanya lokasi wisata budaya, Yogyakarta juga terkenal dengan kulinernya. Dari mulai Gudeg, Bakmi, Yogyakarta juga terkenal dengan bakpianya. "... Di persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila..." Demikian kutipan bait lagu Yogyakarta.

Selain Malioboro, lokasi jalan-jalan yang bisa dikunjung wisatawan adalah Pasar Ngasem. Berbeda dengan pasar pada umumnya, Pasar Ngasem menjadi salah satu destinasi kuliner yang berlokasi di sekitar Taman Sari.

Lokasi Pasar Ngasem berada di Jalan Polowijan Nomor 11, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut sejarahnya, kawasan Pasar Ngasem dahulunya merupakan danau yang sering digunakan Sultan Hamengku Buwono II berpelesir sambil melihat-lihat keindahan keraton dari luar benteng.

Namun, sekian waktu berjalan danau tersebut beralih fungsi menjadi perkampungan dan di tengah-tengah kampung tersebut menjadi sebuah pasar yang khusus menjual burung. Setelah pasar burung direlokasi ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), Pasar Ngasem berkembang menjadi pasar seni, kerajinan, bahkan kini menjajakan sejumlah kuliner yang bisa dicicipi wisatawan.

Kini, pasar tersebut menjadi salah satu destinasi wisata kuliner para wisatawan maupun warga lokal. Berbagai kios menjajakan makanan dari yang 'berat' maupun 'ringan' khas Yogyakarta. Misalnya, Warung Bu Sirep yang menyediakan menu seperti bubur krecek, gudeg basah, brongkos, pepes, berbagai lauk, hingga minuman segar seperti wedang uwuh, bandrek, jahe sereh, serta kunyit asem.

Ada juga Warung Makang Yu Ngademi. Tempat makan dengan menu berat lainnya yang berada dekat pintu masuk Pasar Ngasem. Kuliner yang satu ini memang menjadi incaran para pengunjung karena menunya beragam. Jika ingin menikmati, maka harus siap antri.

Bagi wisatawan yang hanya ingin menikmati makanan ringan. Bisa mampir ke Warung Yu Jumilah. Menunya utamanya adalah jenang dengan berbagai jenis dan rasa dengan harga Rp 10 ribu-an per porsi jenang ukuran sedang. Pengunjung juga harus bersabar antri untuk menikmati jenang khas Warung Yu Jumilah ini.

Makanan ringan lainnya adalah apem yang menjadi salah satu makanan legendaris di Pasar Ngasem. Rasanya yang manis dan gurih membuat banyak orang rela mengantri meski sangat panjang. Kuliner yang satu ini buka mulai jam 06.00 WIB hingga habis.

Jika ingin membeli oleh-oleh, di Pasar Ngasem juga banyak yang menjual makanan ringan khas dengan kemasan plastik. Satu lagi yang tidak boleh terlewatkan adalah membeli oleh-oleh Bakpia Pathok dan Wingko Pak Bambang Wiwid. Wisatawan bisa menikmati bakpia rasa kacang ijo dan keju, serta wingko hangat.

Harga Bakpia Rp 20.000/boks isi 10, sedangkan wingko Rp 30.000/boks isi 10. Saat musim liburan, untuk bisa mendapatkan Bakpia dan wingko, kita harus rela antri. Rasanya tak kalah dengan merek bakpia pathok lain yang sudah sangat terkenal.

Di balik tembok Njeron Beteng, kawasan yang sarat sejarah di Kota Yogyakarta, Pasar Ngasem menyimpan cerita panjang tentang perjalanan waktu. Lebih dari sekadar pasar, tempat ini menjadi saksi bisu transformasi budaya dan sosial selama lebih dari dua abad.

Kini Pasar Ngasem telah bertransformasi menjadi pusat kuliner yang tak hanya dikunjungi wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Berbaur dalam pasar sambil lesehan menikmati kuliner khas Yogyakarta. Bagi wisatawan jangan lewatkan jika berkunjung ke Kota Gudeg. **Yul**







Lahan Kering dan Rawa, Asa Baru Kedaulatan Pangan



Dr. Ir. Basri A. Bakar, M.Si

Di tengah krisis iklim, ketidakpastian geopolitik global, dan fluktuasi harga pangan dunia, kemampuan suatu negara untuk memproduksi makanan bagi rakyatnya menjadi ukuran baru dari kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan tantangan yang kompleks. Meski telah 80 tahun Merdeka, kita belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras sebagai bahan pokok utama mayoritas rakyat Indonesia.



Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per Desember 2024 menunjukkan luas baku sawah Indonesia saat ini hanya sekitar 7,38 juta hektar (ha). Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 4,7 juta ha yang memiliki sistem irigasi yang tergolong baik. Sisanya berada dalam kondisi tanpa irigasi atau beririgasi minim, yang berarti tidak dapat diandalkan untuk produksi maksimal sepanjang tahun.

Lebih mengkhawatirkan lagi, tren alih fungsi lahan sawah terus berlanjut. Dalam lima tahun terakhir saja, Indonesia telah kehilangan sekitar 79.607 ha lahan sawah. Sementara itu, data dari Institut IDEAS mencatat bahwa sepanjang 2013 hingga 2019, penyusutan lahan sawah mencapai 287.000 ha. Jika tidak ada upaya pembenahan besar-besaran, maka kita akan terus kehilangan fondasi utama penyediaan pangan nasional.

Akibat keterbatasan lahan, kemampuan produksi padi nasional belum dapat menyaingi laju pertumbuhan konsumsi. Pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 52,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dari luas panen sekitar 10 juta ha. Setelah dikonversi menjadi beras konsumsi (dengan asumsi rendemen sekitar 64%), angka tersebut hanya setara dengan 33,7 juta ton beras masih di bawah kebutuhan nasional sebesar 35,3 juta ton. Artinya, kita mengalami defisit sekitar 1,6 juta ton beras. Defisit ini bahkan lebih besar pada 2023, yaitu sekitar 4,4 juta ton.

Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa mengandalkan sawah irigasi semata tidak lagi cukup. Apalagi tekanan alih fungsi lahan akibat urbanisasi dan ekspansi industri terus meningkat. Dibutuhkan strategi baru, yang tidak hanya mempertahankan sawah eksisting, tetapi juga membuka sumber daya lahan alternatif yang selama ini belum tergarap maksimal.

Potensi Tersembunyi

Indonesia memiliki aset besar yang seringkali luput dari perhatian yakni lahan kering dan lahan rawa pasang surut. Kedua jenis lahan ini sebenarnya menyimpan potensi luar biasa untuk menopang produksi pangan nasional asalkan dikelola dengan pendekatan ilmiah, teknologi spesifik lokasi, serta dukungan kebijakan yang konsisten.

Luas lahan kering di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 144,47 juta ha. Dari jumlah ini, sekitar 82% tergolong lahan suboptimal, terdiri atas lahan kering masam dan lahan kering beriklim kering.

Untuk lahan masam mencapai 107 juta ha, tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagian wilayah Jawa. Permasalahan utama pada lahan ini adalah tingkat kemasaman yang tinggi (pH < 5,5), tingginya kandungan aluminium (Al), serta rendahnya ketersediaan unsur hara seperti fosfor (P).

Tantangan tersebut bukan hal yang tidak bisa diatasi. Teknologi ameliorasi seperti penggunaan kapur pertanian, pupuk hayati, pengelolaan bahan organik, dan pemilihan varietas tahan kondisi masam telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas lahan kering secara signifikan.

Pada beberapa wilayah, lahan kering justru berpotensi ditanam lebih dari satu kali setahun, terutama bila ditunjang ketersediaan air dan manajemen tanam yang baik. Lahan kering cocok dikembangkan dengan tanaman sorghum, kedelai, jagung dan tanaman semusim lainnya.

Sumberdaya lain yang tidak kalah besar adalah lahan rawa pasang surut. Total luasnya mencapai lebih dari 20 juta ha, ditambah sekitar 13 juta ha lahan lebak. Lahan ini memiliki keunggulan yang unik, seperti ketersediaan air yang melimpah, topografi datar yang mendukung mekanisasi, serta aksesibilitas tinggi melalui jalur darat dan air.

Selama ini, pemanfaatan lahan rawa kerap terbentur pada masalah drainase, pengasaman tanah sulfat masam, dan keterbatasan varietas yang mampu beradaptasi. Namun, kemajuan riset agronomi dan teknologi spesifik lokasi kini telah mampu menjawab tantangan tersebut.

Salah satu contoh keberhasilan adalah pengembangan varietas padi *Inpari Nutri Zinc* yang adaptif pada lahan suboptimal, termasuk rawa sulfat masam. Varietas ini tidak hanya tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem, tetapi juga mengandung unsur seng (Zn) tinggi yang penting untuk kesehatan manusia.

Kandungan Zn-nya dapat mencapai hingga 34,5 ppm, jauh lebih tinggi dibanding varietas unggul biasa seperti Ciherang yang hanya mengandung sekitar 24 ppm. Padi biofortifikasi semacam ini merupakan langkah menjawab dua tantangan sekaligus, ketahanan pangan dan perbaikan gizi nasional, termasuk dalam upaya menurunkan angka stunting.

Mengembangkan pertanian di lahan marginal memang bukan pekerjaan ringan. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor dan disiplin, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan petani. Faktor-faktor penentu keberhasilan pengembangan lahan suboptimal antara lain teknologi yang adaptif dan spesifik lokasi, dukungan kebijakan insentif dan pembiayaan. Tak kalah penting adalah partisipasi aktif masyarakat lokal dankoordinasi pusat-daerah yang sinergis.

Selain itu, perencanaan pembangunan lahan harus dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan memperhatikan karakteristik lahan, daya dukung lingkungan, serta kesiapan infrastruktur dan SDM. Pendekatan holistik dan berkelanjutan menjadi mutlak, agar keberhasilan jangka pendek tidak mengorbankan kelestarian sumber daya jangka panjang.

Pemerintah harus menjadikan pengembangan lahan kering dan rawa sebagai bagian integral dari strategi besar ketahanan pangan nasional. Ini tidak bisa dilakukan dengan proyek-proyek sesaat, tetapi memerlukan visi jangka panjang, tata kelola yang baik, serta komitmen anggaran yang konsisten.

Optimalisasi lahan kering dan rawa pasang surut adalah kunci strategis menuju kedaulatan pangan Indonesia. Di tengah keterbatasan lahan sawah dan meningkatnya kebutuhan pangan, lahan suboptimal harus diubah menjadi sumber produksi baru melalui teknologi tepat guna, kebijakan yang mendukung, dan sinergi lintas sektor.

Dr. Ir. Basri A. Bakar, M.Si
(Peneliti Ahli Madya
Pusat Riset Tanaman Pangan/BRIN)

Makan Ubi, Bikin Buang Angin?

Siapa yang tidak pernah mengalami momen canggung setelah makan ubi? Perut terasa kembung dan hasrat untuk buang gas meningkat drastis. Fenomena yang kerap membuat orang enggan mengonsumsi ubi ini, ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik.



Annisa Rizkiriani, SGz, MSi, dosen bidang gizi IPB University membenarkan bahwa setelah mengonsumsi ubi, sebagian orang akan mengalami peningkatan produksi gas (flatulensi). Hal ini disebabkan kandungan karbohidrat kompleks dan serat larut dalam ubi, terutama oligosakarida seperti raffinose dan stakiosa.

"Oligosakarida ini tidak dapat dicerna oleh enzim di saluran cerna bagian atas, sehingga difermentasi oleh bakteri usus besar. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan gas seperti hidrogen, metana, dan karbon dioksida," katanya seperti dikutip dari *laman IPB University.*

Meski menimbulkan efek samping berupa gas, ubi terutama ubi jalar *(Ipomoea batatas)* memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Meliputi karbohidrat kompleks (terutama pati), serat pangan (sekitar 3 gram/100 gram), vitamin A (terutama beta-karoten pada ubi jalar oranye), vitamin C, kalium, vitamin B6, antioksidan (*flavonoid, fenolik*), serta sedikit protein (1–2 gram/100 gram).

"Ubi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti menjaga kesehatan pencernaan karena kandungan seratnya serta meningkatkan imunitas tubuh berkat kandungan beta-karoten dan vitamin C," kata Annisa.

Manfaat lainnya, kandungan kalium di dalam ubi dapat menurunkan tekanan darah. Jenis ubi dengan indeks glikemik sedang hingga rendah mampu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, ubi juga bersifat antioksidan dan antiinflamasi alami.

Siapa yang Direkomendasikan?

Menurut Annisa, Ketua Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB University, ubi sangat baik dikonsumsi oleh penderita konstipasi (sembelit) karena kandungan serat pangannya yang tinggi.

Selain itu, ubi baik untuk penderita hipertensi karena kaliumnya membantu menurunkan tekanan darah. Bagi pengidap diabetes mellitus tipe 2, khususnya jika memilih ubi jalar dengan indeks glikemik rendah dalam porsi terkontrol, ubi bisa menjadi pilihan yang aman.

"Ubi juga membantu orang dengan imunitas rendah berkat vitamin A dan C yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidannya pun cocok untuk mereka yang berisiko penyakit kronis, seperti kanker dan penyakit jantung," tutur Annisa.

Namun, Annisa mengingatkan ada beberapa kelompok yang harus mengurangi konsumsi ubi. Pertama, penderita gangguan ginjal terutama jika fungsi ekskresi kalium terganggu. Kedua, penderita sindrom iritasi usus karena oligosakarida dalam ubi bisa memicu gas, kembung, atau diare.

"Ketiga, orang dengan kadar gula darah sangat tidak terkendali. Keempat, penderita batu ginjal oksalat karena beberapa jenis ubi tinggi oksalat yang dapat memperburuk kondisi," pungkasnya.**dh/Yul**

Ubi Cilembu Lebih Manis, Mengapa?



Ubi Cilembu, varietas lokal dari Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah lama dikenal memiliki cita rasa manis yang unik, terutama saat dipanggang. Rasa manis tersebut tidak muncul maksimal jika hanya direbus atau dikukus.

Dosen Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi IPB University, Ai Imas Faidoh Fatimah, STP, MP, MSc, mengurai alasan dibaliknya. "Ubi cilembu merupakan salah satu kultivar ubi jalar dengan kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar lainnya," ujarnya.

"Karakteristik tanah di Desa Cilembu dan proses penyimpanan selama satu hingga tiga minggu pascapanen menyebabkan peningkatan kadar gula secara alami," katanya seperti dikutip dari laman *IPB University.*

Selama penyimpanan tersebut, menurut Ai Imas, terjadi proses hidrolisis pati menjadi disakarida dan monosakarida atau gula sederhana melalui kerja enzim amilase yang masih aktif. Saat ubi dipanggang pada suhu tinggi antara 200°C hingga 240°C selama 20-40 menit, proses tersebut memecah lebih banyak pati menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa.

Selain itu, proses pemanggangan juga menyebabkan reaksi karamelisasi. "Karamelisasi inilah yang menimbulkan aroma khas dan rasa manis yang lebih kuat, bahkan menghasilkan cairan lengket mirip madu. Karena itu, ubi Cilembu sering disebut juga 'ubi si madu'," ungkapnya.

Terkait perbedaan pengaruh metode pengolahan, Ai Imas menyatakan bahwa baik proses pengukusan maupun pemanggangan memengaruhi komposisi karbohidrat pada ubi.

"Pengukusan cenderung mempertahankan sebagian besar pati. Sementara pemanggangan, karena suhunya lebih tinggi, menyebabkan sebagian pati terurai menjadi gula sederhana seperti maltosa, glukosa, dan fruktosa, sehingga rasa manisnya menjadi lebih intens," katanya lebih lanjut.

Lantas, apakah ubi Cilembu panggang yang terasa lebih manis tetap aman dikonsumsi? Menurut Ai Imas, hal ini tidak menjadi masalah selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tanpa tambahan gula atau lemak.

"Rasa manis pada ubi Cilembu panggang berasal dari gula alami hasil konversi pati, bukan dari tambahan pemanis buatan. Walaupun indeks glikemik ubi panggang bisa lebih tinggi dibandingkan yang direbus atau dikukus, ubi ini tetap kaya akan nutrisi," ujarnya.

Ubi Cilembu juga mengandung serat yang berperan sebagai prebiotik alami, serta beta-karoten dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Karena itu, konsumsi ubi Cilembu panggang tetap direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat.**dr/Yul**

Mentan Ajak Petani Muda Jadi Motor Swasembada Pangan

Sektor pertanian adalah kunci perubahan besar bagi bangsa. Untuk menggapai hal tersebut, peran petani muda sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak. Karena itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengajak petani muda turun ke sawah dan menjadi motor penggerak swasembada pangan serta hilirisasi pertanian.

"Yang bisa mengubah republik ini adalah sektor pertanian. Ada keunggulan komparatif disana, dan Indonesia memiliki itu," ujar Amran dalam pertemuan dengan para Champion Petani Milenial di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (14/8).

Dalam pertemuan tersebut hadir petani muda dari berbagai wilayah Indonesia. Bukan sekadar pertemuan formal, dialog ini menjadi ajang curhat dan tukar pikiran yang hangat, penuh motivasi, dan sarat pesan membangun. Pada awal audiensi, Amran langsung memanggil petani muda satu per satu untuk mendengar cerita tentang usaha yang mereka jalankan, termasuk berapa omset setiap tahun.

Jawaban yang muncul cukup mengejutkan, ada yang omsetnya menembus Rp10 miliar per tahun. Angka itu disambut tepuk tangan riuh, menjadi bukti bahwa generasi muda mampu menjadikan sektor pertanian sebagai ladang bisnis yang sangat potensial.

Ia kemudian membagikan filosofi hidup dan bisnis yang lahir dari pengalaman panjangnya. Amran juga memberikan tips menjadi pengusaha sukses. "Mau kaya? Kurangi tidur, perbanyak komunikasi dan bertahan dalam tekanan. Jangan pernah pikir hasil. Harus berproses. Bangkrut adalah guru terbaik, itu pelatihan terbaik dalam hidup," kata Amran.

Mentan juga menekankan pentingnya fokus dan mental juang. "Fokus apa yang kamu rancang, jadi yang terbaik di dunia. Mengeluh tandanya gagal. Ketika ada kesulitan dan masalah, jangan ketemu dengan lawanmu. Harus bertempur jangan mundur," tegasnya.

Ia tak lupa mengingatkan agar kesuksesan tidak membuat seseorang tinggi hati. "Bagaimana dunia ini tersenyum ketika kamu berusaha. Jangan sombong, karena sombong rezekinya akan sulit," ucapnya.

Lebih jauh, Mentan Amran menyebut bahwa komitmen adalah modal terbesar. "Paling mahal dalam berbisnis adalah janji dan konsisten. Yang sulit adalah konsisten. Setiap bisnis yang baik adalah tumbuh bersama, manusia hebat adalah bergerak bersama," tuturnya.



Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang turut hadir menambahkan dua harapan besar untuk para petani muda. "Yang pertama, kita ingin petani muda kita makin kaya makin sukses dan seterusnya. Jumlah orangnya makin banyak. Tambah besar omzetnya dan jumlahnya. Yang ke dua, menjadi pengusaha berjiwa pejuang itu adalah ideologi. Kekayaan dan kenikmatan itu bukan hanya untuk diri anda sendiri, jiwa nasionalisme dan kita membangun bangsa. Penerima manfaat untuk mensejahterakan anda dan orang-orang di sekitar anda semua," tuturnya.

Sudaryono juga berpesan, duta petani milenial yang menjadi pengusaha harus berjiwa pejuang. Untuk itu, dalam jambore petani milenial akan ditanamkan ideologis. “Bukan hanya sukses sekarang dan akan datang, tapi juga memiliki ideologis bahwa usahanya untuk kesejahteraan mereka dan orang lain juga,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arisanti, menjelaskan bahwa kegiatan ini memang dirancang untuk menguatkan peran generasi muda di sektor pangan.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM pertanian. Pertama, lebih meningkatkan peran petani milenial dalam rantai pasokan pangan nasional. Kedua, mengakselerasi transformasi pertanian konvensional menjadi pertanian modern. Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM. Keempat, hilirisasi produk berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Humas BPPSDMP

TANI SUKSES



Berternak Itik dan Sapi, Aldi Jadi Inspirasi

Di tengah arus modernisasi yang membuat banyak pemuda desa memilih merantau, Aldi, pemuda Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, justru memilih kembali ke kampung halaman.

Pemuda berusia 32 tahun ini membuktikan bahwa sawah dan kandang bisa menjadi sumber kemakmuran.

Bermodal semangat dan keyakinan, Aldi membangun usaha peternakan itik dan sapi secara mandiri. Kini, ia menikmati hasil kerja kerasnya dan menjadi contoh sukses bagi generasi muda di desanya.

Setiap hari, Aldi mengurus sekitar 600 ekor itik yang digembalakan berpindah-pindah memanfaatkan lahan sawah pasca panen. Sistem ini membuat biaya pakan lebih hemat dan itik tetap sehat.

Dari 600 itik, rata-rata Aldi bisa panen 400 butir telur setiap hari." Kalau dijual bisa dapat Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per hari. Sebulan bisa tembus Rp10 juta, apalagi kalau musim ramai," ungkapnya.

Tak hanya fokus pada unggas, Aldi juga mengembangkan peternakan sapi. Ia saat ini memelihara sembilan ekor sapi, tiga di antaranya adalah sapi betina produktif yang rutin melahirkan anak. Sapi-sapi tersebut dirawat dengan penuh perhatian.

"Anak sapi betina saya rawat sampai setahun lebih, lalu dijual Rp8 juta. Kalau jantan, bisa sampai Rp15 juta saat usianya dua tahun," jelasnya.

Kunci keberhasilan Aldi adalah konsistensi, disiplin, dan semangat untuk terus belajar. Ia percaya bahwa bertani dan beternak bukan pekerjaan kelas dua, melainkan pekerjaan yang mulia dan strategis.

"Saya ingin mengubah cara pandang orang. Bertani itu bukan pekerjaan kotor, tapi pekerjaan penting. Kita menyuplai kebutuhan pangan. Itu mulia," tegasnya.

Aldi tak hanya bekerja keras, tapi juga berpikir ke depan. Ia mencatat pengeluaran dan pemasukan, belajar dari pengalaman peternak lain, serta aktif mengikuti perkembangan informasi seputar pertanian dan peternakan.

"Awalnya coba-coba. Sekarang saya tahu cara hitung modal, untung, dan siklus usaha. Yang penting jangan cepat menyerah," tambahnya.

Ia berharap semakin banyak pemuda yang tidak malu kembali ke desa dan membangun usaha dari tanah sendiri.

"Kita bisa sukses tanpa harus ke kota. Tinggal di kampung pun bisa sejahtera, asal mau bekerja dan berpikir cerdas," tutupnya.

Dengan semangat dan ketekunan, Aldi telah membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari kota besar. Di tangan anak muda seperti dirinya, lahan sawah dan kandang ternak bisa berubah menjadi sumber kemakmuran dan inspirasi bagi banyak orang.**Suriady/Her**





Tabloid Sinar Tani
PERTANIAN INDONESIA BARU

SINTA TV

PRICE LIST BERLANGGANAN



SINAR TANI CETAK

RP. 16.000
Per Edisi
Minimum Pembelian

Rp 64.000/BLN
Rp 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER

Rp. 72.000/ Thn

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor Whatsapp : .....
Email : .....
Jabatan : .....

No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

CONTACT

081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV

Jaksa Masuk Sawah

Jika dulu ada istilah ABRI Masuk Desa, maka kini ada Jaksa Masuk Sawah. Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia meluncurkan Program Jaksa Mandiri Pangan.



Setelah TNI dan Polri turun ke sawah membantu program swasembada pangan, kini giliran Kejaksaan Agung RI yang menggarap lahan sawah hasil rampasan negara dari hasil tindak pidana untuk budidaya padi. Salah satunya milik koruptor ASABRI, Benny Tjokro yang berlokasi di Tambun, Bekasi.

Panen perdana di lahan rampasan tersebut berlangsung Selasa (19/8) di Desa Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dihadiri Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. ST. Burhanuddin, S.H, MM, Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H.,L.LM dan para pimpinan dari Perum Bulog, PT. Pupuk Indonesia (Persero), Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi.

Burhanuddin mengatakan, Program Jaksa Mandiri Pangan merupakan dukungan terhadap Program Asta Cita yang kedua, yaitu mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, program Jaksa Mandiri Pangan sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan menjadi kewajiban semua jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia.

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa seluruh jajaran kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Kejaksaan Negeri (Kajari), wajib mendukung penuh upaya mempercepat swasembada pangan nasional.

"Saya perintahkan untuk semua daerah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini adalah langkah dalam rangka bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan wajib hukumnya bagi semua jajaran kejaksaan untuk mendukungnya," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menekankan bahwa pangan adalah persoalan strategis yang menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, bahkan hukum. Dirinya akan menegur jajarannya yang tidak turut mendampingi dan mengawal program swasembada pangan. "Pangan adalah masalah perut. Jika kekurangan pangan, maka akan rawan terjadi korupsi. Karena itu, menjadi kewenangan Kejaksaan Agung untuk menangkap "tikus-tikus" koruptor," tegasnya.

Manfaatkan Aset Sitaan Koruptor

Selain mengawal program Kementerian Pertanian, Kejaksaan juga mendorong pemanfaatan aset-aset sitaan perkara korupsi untuk mendukung program Jaksa Mandiri Pangan. Lahan sitaan tersebut kini produktif ditanami padi, sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan pembangunan bisa berjalan beriringan.

Sebagai pilot project Program Jaksa Mandiri Pangan, Kejaksaan telah mengkoordinasikan penyediaan lahan tanah barang rampasan tindak pidana korupsi PT ASABRI (Persero) atas nama terpidana Benny Tjokro yang berlokasi di Tambun, Kabupaten Bekasi.

Sebanyak 414 bidang tanah dengan total seluas 3.300.524 m^2 atau lebih dari 330 Ha lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk budidaya padi guna memenuhi kebutuhan beras nasional. Hitungannya, jika tiap 1 ha memproduksi 5 ton, maka setiap kali panen (musim) mampu memproduksi 1.650 ton.

Program Jaksa Mandiri Pangan di Kabupaten Bekasi ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan hasil panen. Panen di desa Srimahi ini berpotensi mencapai 7 ton/ha. "Kita punya lahan sitaan sekitar 1000 hektar tapi tidak satu hamparan. Di sini yang paling dekat dengan kota, bahkan ini tanah sitaan yang harganya paling tinggi, karena berdekatan dengan perumahan-perumahan," katanya.

Menurut Burhanuddin, hasil panen Program Jaksa Mandiri Pangan bukan untuk Kejaksaan, tapi untuk masyarakat. "Ini adalah wujud nyata penegakan hukum yang berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum ditegakkan dengan tetap ada azas kemanfaatan," tegasnya.

Dalam mengimplementasikan program tersebut, Kejaksaan menggandeng Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum Bulog. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Perjanjian Kerjasama Nomor : B-709/D/DS.2/03/2025 tentang Pemanfaatan Lahan Barang Rampasan dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan.

Peran masing-masing pihak, Kejaksaan mengkoordinasikan ketersediaan lahan tanah, Kementerian Pertanian mengkoordinasikan bibit, sarana prasarana pertanian serta pembinaan kelompok tani. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengkoordinasikan penyediaan pupuk, Perum Bulog mengkoordinasikan pembelian hasil panen.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi tinggi atas perintah dan dukungan Jaksa Agung. Keterlibatan kejaksaan terbukti mempercepat realisasi berbagai program pertanian, mulai dari distribusi pupuk hingga pencetakan sawah baru. Apalagi sesuai arahan Presiden, barang sitaan ini dioptimalkan.

"Dampak Program Jaksa Mandiri Pangan ini luar biasa, bahkan sangat besar dalam percepatan cetak sawah. Kalau Kementan yang minta, kadang proses pendistribusian dan program pangan bisa tertunda. Tapi kalau ada perintah dari Kajati atau Kajari, proses langsung jalan malam itu juga. Dampaknya sangat besar terhadap percepatan produksi pangan nasional," ujarnya.

Hitungan Amran, jika seluruh Kejaksaan Tinggi di 14 sentra produksi padi di Indonesia memberikan dukungan,maka setiap 1 ton padi dari 65 juta ton itu dampaknya Rp 6,5 triliun. Kementerian Pertanian mempunyai program cetak sawah seluas 225.000 ha.

Dalam rangkaian kegiatan ini dilaksanakan seremonial pembelian gabah oleh Perum Bulog sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan penyerapan hasil panen petani. Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 14 ton dengan harga Rp 6.500,-/kg.

Luas lahan panen sekitar 2 ha dengan varietas padi Cakrabuana yang berumur genjah, karena dapat dipanen pada umur sekitar 80-85 HST (hari setelah tanam) dan mempunyai potensi produktivitas 7 ton/ha.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang terbit pada 27 Maret 2025 menjadi landasan Perum Bulog dalam melakukan pembelian hasil panen.

Melalui program pemanfaatan lahan ini dan adanya kepastian penyerapan hasil produksi menjadi bukti kongkrit keberpihakan pemerintah kepada petani. Bahkan diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional. **Indri/Yul**



Subandi
Sulap Lahan Rawa jadi **Surga Durian**

Di balik rawa-rawa yang dulunya sering terendam banjir, berdiri surga durian yang kini ramai dikunjungi pecinta buah tropis ini. Subandi, seorang petani visioner berhasil menyulap lahan seluas 40.000 meter persegi menjadi kebun buah dan wisata edukasi.

Berjarak hanya 25 km dari Kota Medan dan 3 km dari Bandara Kualanamu, Ladang Atok sangat mudah diakses. Begitu sampai, pengunjung akan disambut jembatan gantung (rambin) sepanjang 25 meter yang membentang di atas anak Sungai Sei Serdang, membawa nuansa petualangan sejak langkah pertama.

Dengan lebih dari 350 pohon durian berbagai varietas unggulan seperti Musang King, Kane, Durian Hitam, Bawor, dan Tembaga, pengunjung bisa menikmati pengalaman langka memetik dan menyantap durian langsung dari pohonnya.

Uniknya, buah-buah durian yang sudah matang diikat agar tergantung di pohon, sehingga tidak jatuh dan bisa dipetik dengan aman. "Kalau musimnya tiba, pengunjung bisa langsung makan durian dari pohonnya. Sekarang sedang ada promo spesial, hanya Rp 100.000 per kilogram," ujar Subandi saat ditemui sambil menyantap durian hitam bersama tim Sinar Tani.

Namun Ladang Atok bukan hanya soal durian. Konsep yang dikembangkan Subandi mengusung pertanian terpadu yang menyatu dengan alam, edukasi, dan hiburan keluarga. Di tengah kebun durian, pengunjung akan menemukan tanaman kakao, koloni lebah trigona, dan sekitar 3.000 batang pohon pinang yang menjulang di sekelilingnya.

Tak jauh dari situ, ada delapan kolam ikan berbasis air tenang yang dipenuhi ikan nila, gurami, patin, dan ikan mas. Anak-anak PAUD dan TK bisa belajar memberi makan ikan, menanam padi, hingga menangkap ikan langsung—pengalaman luar ruang yang edukatif sekaligus menyenangkan.

Untuk kegiatan outbound, tersedia flying fox, arena ATV, serta berbagai wahana permainan lainnya. Di sisi lain, petani muda dan komunitas pertanian juga bisa mengikuti pelatihan yang difasilitasi di saung pelatihan dan laboratorium pertanian. Bahkan, penginapan sudah disediakan bagi pengunjung dari luar kota.

Subandi mengungkapkan, saat ini Ladang Atok sedang dalam proses untuk diakui sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). "Progresnya sudah mencapai 70 persen. Kami harap akhir tahun 2025 bisa diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian," katanya penuh harap.

Menariknya, tidak ada biaya masuk ke Ladang Durian Atok Araskabu untuk saat ini. Pengunjung cukup membayar jika ingin menikmati durian dan mencoba beberapa fasilitas tertentu. Konsep petik langsung dari pohon, suasana alami, serta edukasi yang bermanfaat menjadikan Ladang Atok pilihan sempurna untuk wisata keluarga dan komunitas. **Istansu/Herman**

Komersialisasi E-PAPER Sinar Tani

Tabloid Sinar Tani | Tabloid sinartani.com | SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | @SinarTaniST | tabloidsinartani | SINTA TV

BULOG Gandeng KDMP Distribusikan Beras SPHP

Perum BULOG menjalin kemitraan strategis bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah. Salah satu contoh konkret terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara, BULOG mendukung KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) Selumit Cabang Tarakan untuk memastikan distribusi beras dan bahan pangan pokok lainnya kepada masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan.



Kolaborasi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan kolektif yang melibatkan kekuatan rakyat melalui koperasi. “Kami di Perum BULOG sangat memahami pentingnya pemerataan akses pangan, terutama di daerah 3TP, terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan. Bersama KDKMP, kami membangun jalur distribusi yang merakyat, efisien, dan menjangkau hingga ke pintu rumah warga,” ujar Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita.

Menurut Febby, koperasi-koperasi lokal memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi dan penguatan ekonomi rakyat, sekaligus mitra penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. BULOG tidak hanya menyalurkan stok pangan, tapi juga mendukung penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan, pendampingan, serta sistem distribusi yang transparan dan tepat sasaran.

“Contohnya di Tarakan, kerja sama antara BULOG dan KKMP Selumit telah berhasil memfasilitasi penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) langsung ke masyarakat dengan harga terjangkau, tanpa rantai distribusi panjang yang membebani konsumen. Ini adalah model kolaborasi yang ingin kami replikasi di seluruh Indonesia,” tuturnya.

KDKMP merupakan bagian dari gerakan koperasi modern yang digagas untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat lokal. Dengan jaringan ribuan cabang di seluruh nusantara, koperasi ini menjadi ujung tombak distribusi pangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

“BULOG melihat koperasi sebagai mitra strategis jangka panjang, yang tidak hanya membantu pendistribusian beras dan bahan pokok, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam penanganan gejolak harga, cadangan pangan pemerintah, serta bantuan pangan kepada masyarakat rentan,” kata Febby Novita.

Dalam konteks ketahanan pangan, sinergi antara BULOG dan koperasi bukan sekadar urusan logistik, ini adalah bagian dari bela negara dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjaga perut rakyat agar tetap kenyang, stabil, dan sejahtera. “Kami ingin menunjukkan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyata nasionalisme ekonomi. Saat BULOG dan koperasi bersatu, kita bukan hanya menyalurkan beras, kita sedang menjaga kedaulatan pangan bangsa,” tegas Febby.

Dari Sabang sampai Merauke, BULOG bersama KDKMP terus memperluas jangkauan distribusi pangan. Dengan jaringan gudang dan armada logistik yang terintegrasi, BULOG memastikan bahwa tidak ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam urusan pangan.

”Melalui langkah-langkah konkret seperti di Tarakan, BULOG membuktikan bahwa kolaborasi antara BUMN pangan dan koperasi rakyat mampu menjawab tantangan distribusi pangan di era modern, sekaligus memperkuat ekonomi lokal,” katanya.

BULOG mendukung kehadiran KDKMP sebagai program prioritas nasional dari Pemerintah. Sesuai Inpres 9 Tahun 2025, KDKMP memiliki semangat membangun kekuatan ekonomi dari tingkat desa/kelurahan melalui sistem gotong royong dengan memastikan ketersediaan dan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat desa/kelurahan.

Hingga kini, sebanyak 474 KDKMP telah dtetapkan sebagai RPK oleh BULOG dan memiliki omset penjualan lebih dari Rp 4,7 miliar. RPK merupakan outlet milik masyarakat yang dibina dan dapat mendistribusikan berbagai macam komoditi yang dimiliki BULOG. **Yul**

Cek Beras SPHP di Semarang, Mentan: Harga Mulai Turun

Operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah memberikan dampak positif terhadap penurunan harga beras tersebut. Hingga kini diperkirakan harga beras di 13 provinsi berangsur turun.

“Alhamdulillah kita melihat operasi pasar SPHP yang sekarang penyaluran hariannya sudah 6.000 ton. Kita target naik 7.000 ton kemudian 10.000 ton per hari. Ini sudah berdampak baik menurunkan harga di 13 provinsi, mungkin sudah 15 provinsi sudah turun harga. Ini sangat baik untuk kita semua,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat meninjau Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8).

Amran mengatakan, operasi pasar ini akan berlangsung hingga Desember 2025 dengan total penyaluran 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia. Sinergi pemerintah dengan berbagai instansi termasuk TNI/Polri turut mempercepat stabilisasi harga.



Selain operasi pasar, Amran menjelaskan faktor lain yang dapat menurunkan harga beras. Misalnya, peningkatan serapan gabah petani yang berdampak pada harga padi juga berdampak pada harga beras.

”Kami perhatikan serapan gabah meningkat dari 3.000 ton menjadi 6.000 ton per hari. Artinya, harga beras di hilir turun, dan serapan gabah di petani meningkat. Namun kita tetap menjaga agar harga gabah minimal sesuai HPP Rp6.500 per kilogram sehingga petani tetap sejahtera dan konsumen bisa tersenyum,” tuturnya.

Amran menekankan capaian penting lain yang patut disyukuri, yakni stok beras nasional yang melimpah hingga 4 juta ton. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu ketika Indonesia masih harus mengimpor hingga 7 juta ton beras.

“Hari ini kita bisa penuhi kebutuhan sendiri tanpa impor. Ini pencapaian besar di tengah banyak negara lain yang justru kesulitan beras. Kita patut bersyukur, stok kita tinggi, harga mulai turun, dan tidak ada impor beras,” tegasnya.

Selain itu, dirinya memastikan bahwa kelancaran produksi pangan dengan adanya panen di berbagai sentra produksi. Dengan skema HPP yang ditetapkan pemerintah, petani mendapatkan kepastian harga. Hal ini turut menstimulus produksi padi sepanjang tahun serta meningkatkan kesejahteraan petani.

“Pemerintah bekerja keras memastikan kesejahteraan petani terjaga, sementara masyarakat memperoleh harga yang terjangkau. Dengan operasi pasar yang terus berlanjut, kami pastikan harga beras akan semakin turun dalam beberapa pekan ke depan,” katanya. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, karena ketersediaan beras nasional sejatinya aman. **Yul**

Sidik Jari, Buka Jalan Telusuri Silsilah Penyu



Penyu di laut Indonesia ternyata punya "sidik jari" genetik yang berbeda. Temuan ini jadi kunci penting untuk melindungi mereka dengan strategi konservasi yang lebih tepat dan tidak asal-asalan.

Di balik tempurung yang keras dan lenggak-lenggok renangnya yang anggun menari diantara ombak, penyu ternyata menyimpan rahasia dalam dirinya, jejak genetika yang tak kasatmata, namun menjadi kunci untuk menjaga kelestarian mereka secara lebih cermat.

Selama ini, konservasi penyu banyak bergantung pada pendekatan visual seperti menghitung jumlah sarang, memantau lokasi pendaratan, dan memperkirakan populasi. Tapi cara-cara itu, belum mampu menjawab pertanyaan besar tentang asal-usul dan hubungan antarpopulasi yang terpencar jauh oleh jarak, waktu, bahkan arus laut. Kini, lewat genetika, kisah yang tersembunyi selama ribuan tahun mulai terbuka lembar demi lembar.

Dr. Beginer Subhan, peneliti Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University menyebut, genetika bisa menjadi jendela untuk menelusuri silsilah penyu, dari nenek moyang mereka hingga melihat seberapa erat keterhubungan antar kelompok dari pulau ke pulau.

Dalam kegiatan yang diadakan *Disaster Management Center Dompet Dhuafa*, ia menyatakan dengan pemetaan genetik yang tepat, konservasi bukan lagi sekadar menyelamatkan. Namun demikian, menyambung kembali simpul-simpul kehidupan yang selama ini tersebar dan terputus diam-diam.

Begin menyebut, ada dua penelitian yang dilakukan IPB University untuk memetakan genetika penyu di Indonesia. Tahun 2024 lalu, ia dan timnya mengkaji penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) di wilayah Laut Jawa. Mereka menganalisis bagian DNA spesifik yang disebut d-loop dari 152 individu penyu yang bertelur di enam lokasi berbeda.

Hasilnya mengejutkan, ditemukan 20 jenis haplotipe atau "sidik jari" genetik, sebanyak 13 diantaranya adalah temuan baru dan menunjukkan kekayaan genetika penyu sisik Indonesia yang luar biasa. Lebih menarik lagi, beberapa haplotipe yang ditemukan di Indonesia ternyata juga ditemukan di Malaysia dan Australia.

Artinya, ada hubungan genetik lintas negara yang menyiratkan pergerakan penyu dalam skala besar, ribuan kilometer jauhnya dan tetap kembali ke tempat asal untuk bertelur. "Bisa jadi penyu-penyu ini 'traveling' jauh, tapi ingat jalan pulang. Itu luar biasa," ujar Begin.

Temuan ini membuka mata akan pentingnya kerjasama konservasi lintas negara. Populasi penyu tidak mengenal batas negara, tapi mereka bergerak mengikuti arus, suhu, dan insting nenek moyangnya. Karena itulah, Begin menekankan bahwa perjanjian konservasi internasional harus mempertimbangkan konektivitas genetik ini.

Jarak Dekat, Beda Genetik

Sementara itu, riset lain terhadap penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) pada 2020 juga menguak cerita genetik yang tak kalah menarik. Salah satu titik fokusnya adalah Teluk Cendrawasih, wilayah timur Indonesia yang dikenal sebagai surga bawah laut. Di kawasan ini, tim menemukan bahwa populasi penyu dari Kwatisore dan Pulau Yapen punya komposisi genetik yang berbeda meski secara geografis tidak terlalu berjauhan.

Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Ternyata jawabannya adalah arus laut. Selama musim angin barat laut, arus laut bertindak seperti pagar alami, menghalangi pertukaran genetik antarpopulasi. Akibatnya, penyu dari wilayah satu dan lainnya berkembang dengan jalur evolusi masing-masing. Mereka seperti dua saudara yang tinggal di desa berbeda dan tumbuh dengan budaya sendiri-sendiri.

Pemetaan ini bahkan membagi populasi penyu lekang ke dalam beberapa klad. Salah satu klad besar terdiri dari lima lokasi di Indonesia bagian barat seperti Aceh, Pariaman, Panggul, Serangan, dan Tuafanu dan punya koneksi genetik dengan populasi dari India.

Sementara klad lainnya ditemukan di timur Indonesia yakni Kapoposang, Pulau Yapen, dan Teluk Cendrawasih. Australia sendiri ternyata berbagi sebagian besar haplotipe dengan wilayah Indonesia. "Bayangkan betapa menakjubkannya, seekor penyu yang bertelur di pesisir Papua ternyata punya ikatan genetik dengan 'sepupu jauhnya' di pesisir barat India," ungkap Begin.

Pendekatan Konservasi

Temuan-temuan ini bukan hanya jadi catatan ilmiah semata. Ia memberi pesan yang tegas, konservasi tak bisa disamaratakan. Populasi penyu dengan genetik berbeda tentu membutuhkan pendekatan yang juga berbeda. "Ini seperti meracik obat yang tidak semua pasien bisa disembuhkan dengan resep yang sama," ujar Begin.

Konservasi yang selama ini mengandalkan model umum, kini harus lebih presisi. Di daerah dengan keragaman genetik tinggi, strategi pelestarian harus fokus menjaga variasi agar tak hilang. Sebaliknya, di wilayah dengan pertukaran genetik rendah, perlu pendekatan yang bisa menjaga populasi agar tak menyusut akibat perkawinan sedarah atau jumlah individu yang terlalu sedikit.

Fakta ini mengingatkan bahwa penyu tidak bisa lagi diperlakukan sebagai satu populasi tunggal. Mereka unik. Mereka punya identitas genetik masing-masing. Jika satu populasi punah, misalnya di Teluk Cendrawasih, maka haplotipe yang hanya ada disana bisa hilang selamanya. "Tidak bisa digantikan oleh populasi dari Aceh, apalagi dari Australia, inilah urgensi konservasi berbasis genetika," katanya.

Pengetahuan tentang struktur genetika ini membuka pintu untuk menyusun rencana konservasi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Tak hanya menjaga lingkungan, upaya ini juga menyentuh ranah ekonomi lokal, budaya pesisir, hingga industri pariwisata yang bertumpu pada keindahan laut.

Dengan pendekatan ini, konservasi tak lagi sekadar menjaga agar penyu tetap hidup, tetapi memastikan mereka tetap menjadi bagian dari simfoni laut tropis yang utuh, lestari, dan diwariskan hingga generasi mendatang. **Gsh/Yul**

